

**KEBIJAKAN PEMBERDAYAAN
BADAN USAHA MILIK DESA
[BUMDes]**

**Sanksi pelanggaran Pasal 72
Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002
Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 1997
Pasal 44 Tentang Hak Cipta**

1. Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) atau pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) dipidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)
2. Barang siapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran hak cipta atau hak terkait, sebagaimana dimaksud ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)

KEBIJAKAN PEMBERDAYAAN BADAN USAHA MILIK DESA [BUMDes]

Dr. Andy Alfatih, MPA
Dr. Diana Dewi Sartika, MSi
Dra. Dyah Hapsari, ENH, MSi



**KEBIJAKAN PEMBERDAYAAN
BADAN USAHA MILIK DESA
[BUMDes]**

Dr. Andy Alfatih, MPA

Dr. Diana Dewi Sartika, MSi

Dra. Dyah Hapsari, ENH,MSi

UPT. Penerbit dan Percetakan

Universitas Sriwijaya 2022

Kampus Unsri Palembang

Jalan Srijaya Negara, Bukit Besar Palembang 30139

Telp. 0711-360969

email : unsri.press@yahoo.com, penerbitunsri@gmail.com

website : www.unsri.unsripress.ac.id

Anggota APPTI No. 005.140.1.6.2021

Anggota IKAPI No. 001/SMS/96

140 halaman : 16 x 24 cm

Hak cipta dilindungi undang-undang.

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini dalam bentuk apapun, baik secara elektronik maupun mekanik, termasuk memfotokopi, merekam, atau dengan menggunakan sistem penyimpanan lainnya, tanpa izin tertulis dari Penerbit.

Hak Terbit Pada Unsri Press

ISBN : 978-623-399-061-5

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah! Atas rahmat Allah SWT, buku sederhana yang berjudul “Kebijakan Pemberdayaan Badan Usaha Milik Desa [Bumdes]” ini akhirnya dapat juga diselesaikan walaupun sebenarnya penulis cukup sibuk dengan kegiatan tri dharma perguruan tinggi.

Buku ini berisikan hasil penelitian mengenai kebijakan pemberdayaan badan usaha milik desa [Bumdes] selama 3 tahun berturut-turut dengan dana penelitian dari Pendapatan Negara Bukan Pajak [PNBP] universitas Sriwijaya melalui skema kompetitif universitas.

Penelitian selama waktu tersebut dibagi dalam 3 tahun, yaitu tahun pertama, tahun 2019, penelitiannya berjudul “**Implementasi Kebijakan Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa [BUMDes] di Kabupaten Musi Rawas**”. Pada tahun kedua, tahun 2020, penelitian dilanjutkan lagi dengan judul “**Dampak Implementasi Kebijakan Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa [BUMDes] [Studi terhadap Beberapa BUMDes di Kabupaten Musi Rawas, Provinsi Sumatera Selatan]**”. Selanjutnya, pada tahun terakhir, yaitu tahun 2021, judul penelitiannya yakni “**Kebijakan Pemberdayaan Dan Pemasaran Produk Bumdes Berbasis *E-Commerce* Di Kabupaten Musi Rawas**”.

Penulis berharap agar buku ini bermanfaat bagi banyak pihak untuk berbagai macam tujuan. Disamping itu, karena buku ini pasti jauh dari sempurna, penulis meminta maaf seandainya isi buku ini

tidak sesuai dengan harapan. Penulis juga berharap agar para pembaca memberikan kritik yang membangun [constructive criticism] dalam rangka perbaikan buku ini. Untuk itu, diucapkan terima kasih.

Palembang, Januari, 2022

Penulis,

DAFTAR ISI

	halaman
Kata Pengantar	v
Daftar Isi	vii
BAB 1: Pendahuluan	1
1.1. Pengertian Kebijakan Publik	1
1.2. Fungsi Kebijakan Publik	4
1.3. Implementasi Kebijakan Publik	6
1.4. Makna Pemberdayaan Masyarakat	8
BAB II : Ringkasan Hasil Penelitian	12
BAB III : Hasil Kajian Pemberdayaan Badan Usaha Milik Desa [BUMDes] Judul Asli Penelitian Implementasi Kebijakan Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa [BUMDes] di Kabupaten Musi Rawas	24
3.1. Dimensi Tingkat Kepatuhan terhadap Kebijakan Pendirian BUMDes	31
3.2. Dimensi Kelancaran Rutinitas Fungsi	37
3.3. Dimensi Terwujudnya Kinerja dan Dampak yang Diinginkan	42
3.4. Rekapitulasi Skor dan Kategori Per Indikator	48
3.5. Kesimpulan	52
Bab IV : Hasil Kajian Pemberdayaan Badan Usaha Milik Desa [BUMDes] Judul Asli Penelitian Dampak Implementasi Kebijakan Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa [BUMDes] [Studi terhadap Beberapa BUMDes di Kabupaten Musi Rawas, Provinsi Sumatera Selatan]	55

4.1. Dampak Implementasi Kebijakan dari Berbagai Aspek	55
4.2. Dampak Terhadap Aspek Ekonomi: Peningkatan Modal Usaha	58
4.3. Dampak Aspek Ekonomi: Kemajuan Usaha	64
4.4. Dampak Aspek Ekonomi: Keuntungan Usaha	69
4.5. Dampak Terhadap Aspek sosial: Keterkaitan sosial dengan BUMDes	71
4.6. Dampak Terhadap Aspek Sosial: Keikutan Asosiasi	75
4.7. Dampak Terhadap Aspek Sosial: Tanggapan masyarakat terhadap BUMDes	78
4.8. Dampak Terhadap Aspek Lingkungan: Ketersediaan bahan baku usaha	81
4.9. Dampak Terhadap Aspek Iingkungan: Perlakuan sisa bahan baku Produksi	84
4.10. Dampak Terhadap Aspek Politik: Keterlibatan unsur Parpol	88
4.11. Dampak Terhadap Aspek Politik: Afiliasi/menjalin hubungan dengan parpol.	91

BAB V : Kebijakan Pemberdayaan dan Pemasaran Produk BUMDes Berbasis E-Commerce di Kabupaten Musi Rawas **99**

5.1. Deskripsi Data Bumdes Yang Menjadi Subjek Penelitian	99
5.2. Cara Pemasaran Produk Bumdes	101

BAB VI : Kesimpulan

5.1. Kesimpulan	106
-----------------	-----

Daftar Pustaka	107
Kuesioner	109
Biografi Penulis	117

BAB I

PENDAHULUAN

Penelitian ini, pada dasarnya, berkenaan dengan kebijakan publik, yaitu Peraturan Daerah [Perda] Kabupaten Musi Rawas nomor 10 tahun 2013 tentang pendirian dan prosedur pengelolaan badan usaha milik desa [Bumdes], yang dibuat oleh Pemerintah Daerah, dalam hal ini, Pemerintah Daerah Kabupaten Musi Rawas, Provinsi Sumatera Selatan. Kebijakan publik tersebut bertujuan untuk memberdaya masyarakat. Memperbaiki keadaan serta membuat masyarakat lebih baik dan sejahtera, esensinya, itulah tujuan dibuat dan diimplementasikannya suatu kebijakan publik.

Buku ini berisi hasil penelitian tentang kebijakan publik tersebut diatas yang dilaksanakan sebagai salah satu tri dharma perguruan tinggi yang harus dilakukan oleh seorang dosen. Penelitian ini dibiayai dari dana yang bersumber pada Pendapatan Negara Bukan Pajak [PNBP] Universitas Sriwijaya [Unsri] melalui skema penelitian kompetitif Universitas Sriwijaya selama 3 tahun, yaitu tahun 2019, 2020, dan 2021. Bidang Penelitian : Sosial Humaniora.

1.1. Pengertian Kebijakan Publik

Makna kata kebijakan pada judul buku tersebut di atas adalah kebijakan publik atau dalam bahasa Inggris public policy.

Ada berbagai definisi kebijakan publik, menurut beberapa ahli. Diantaranya adalah sebagai berikut.

Dalam bukunya *Implementasi Program dan Pemberdayaan Masyarakat*, **Andy Alfatih [2010]** menyatakan kebijakan publik adalah setiap keputusan atau tindakan yang dibuat secara sengaja dan sah oleh pemerintah yang bertujuan untuk melindungi kepentingan publik, mengatasi masalah publik, memberdaya publik, dan menciptakan kesejahteraan publik. **(Public Policy is defined as any decision or action is purposely as well as legally made or taken by governments for the sake of public interest, public problems solution, public empowerment, and social welfare)**

Drs. Irfan Islamy, MPA (1994) Kebijakan Publik merupakan serangkaian tindakan yang dipilih dan dialokasikan secara sah oleh pemerintah atau negara kepada seluruh anggota masyarakat yang mempunyai tujuan tertentu demi kepentingan publik.

H. Hugh Heclo, dalam **Drs. Irfan Islamy, MPA (1994)** *Public Policy is a course of actions intended to accomplish some ends.* (Kebijakan publik yaitu serangkaian tindakan yang diambil yang dimaksudkan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya)

Menurut **Thomas R.Dye**, dalam bukunya *Understanding Public Policy (1992)* “*Public Policy is whatever governments choose to do or not to do*”. (Kebijakan publik adalah apapun yang Pemerintah pilih untuk dilakukan atau untuk tidak dilakukan).

Mac Rae and Wilde, dalam **Irfan Islamy, 1994**, menyatakan “*Public Policy is a series of chosen action which has important meaning in affecting a group of people*”. (Kebijakan publik adalah serangkaian tindakan yang dilakukan (oleh Pemerintah) serta secara hakiki mempengaruhi sekelompok orang).

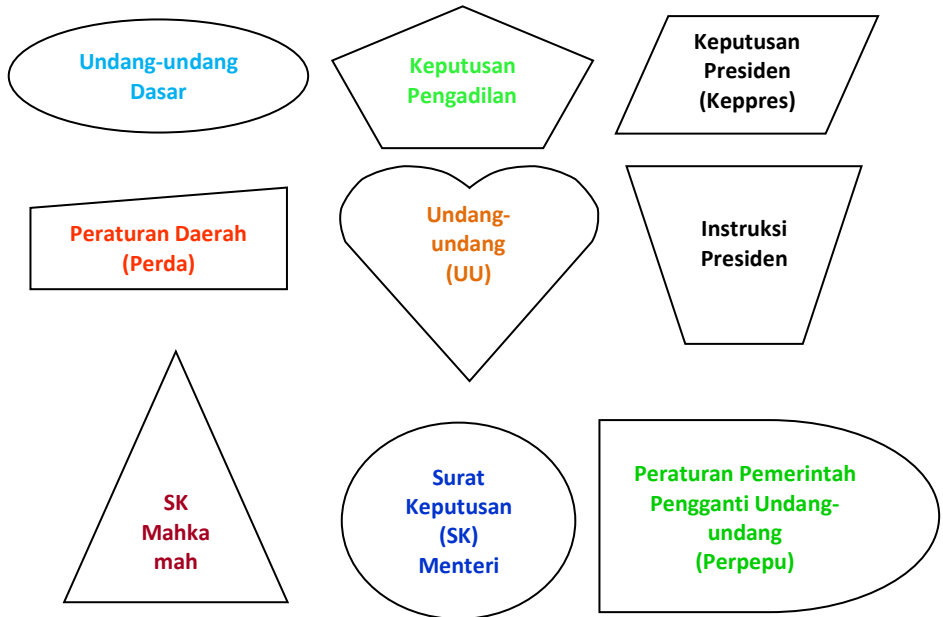
William Jenkins, dalam Hawlett dan Ramesh (2003:6), mendefinisikan “*public policy is a set of interrelated decisions taken by a political actor or group of actors concerning the selection of goals and the means of achieving them within a specified situation where those decisions should, in principle, be within the power of those actors to achieve*”. (serangkaian keputusan yang saling berhubungan yang dibuat oleh seorang atau sekelompok orang pelaku politik yang berkenaan dengan penentuan tujuan dan cara mencapainya dalam keadaan tertentu dimana pencapaian pilihan-pilihan tersebut, pada dasarnya, berada dalam kekuasaan pelaku politik tersebut)

James Anderson, dalam Hawlett dan Ramesh (2003:7), mengungkapkan “*public policy is a purposive course of action followed by an actor or a set of actors in dealing with a problem or matter of concern*”. (serangkaian tindakan tertentu yang sengaja dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang pengambil keputusan (dalam Pemerintahan) guna mengatasi masalah yang ada)

David Easton defines “*public policy as authoritative allocation of values for the whole societies*” (Yousa, 2007:8). Kebijakan publik adalah penerapan berbagai nilai yang bersifat memaksa (oleh Pemerintah) kepada seluruh masyarakat.

Menurut **Harold Laswell and Abraham Kaplan**, “*public policy is a projected program of goals, values, and practices*” (Yousa, 2007:8). Kebijakan publik merupakan suatu program yang dimaksudkan untuk mencapai berbagai tujuan, nilai, serta kelaziman yang berlaku dan diinginkan.

Ada beragam bentuk kebijakan publik, diantaranya adalah Undang-undang Dasar, Undang-undang, Surat Keputusan [SK] dan Peraturan, Peraturan Pemerintah pengganti undang-undang [Perpepu], Peraturan Daerah [Perda], Keputusan Presiden [Keppres], Instruksi Presiden [Inpres], dan lain sebagainya.



Sumber: Andy Alfatih [2010]

1.2. Fungsi Kebijakan Publik

Kebijakan berbeda maknanya dengan kebijaksanaan. Kebijakan merujuk kepada aturan-aturan yang dibuat oleh Pemerintah – seperti beberapa contoh di atas – yang berfungsi sebagai acuan dalam berperilaku atau mengambil tindakan dalam hubungan dengan hak dan kewajiban warga negara. Bila kebijakan dilanggar, maka warga negara yang melanggar tersebut akan dikenai sanksi. Sementara kebijaksanaan adalah tindakan yang dilakukan Pemerintah – dalam rangka membantu masyarakat - yang bertujuan agar kebijakan dapat

dilaksanakan. Dengan kata lain, kebijaksanaan merupakan bentuk niat baik Pemerintah, dimana, di satu sisi untuk meringankan beban rakyat yang harus patuh terhadap suatu kebijakan, serta di sisi lain, untuk melancarkan implementasi suatu kebijakan yang diterapkan kepada rakyat. Lihat contoh di bawah ini.



Di atas ada spanduk tentang pembayaran pajak kendaraan bermotor {PKB}. Kebijakan publiknya dalam bentuk Peraturan Gubernur [PERGUB] Provinsi Sumatera Selatan Nomor 44 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur [PERGUB] Provinsi Sumatera Selatan Nomor 30 tahun 2020 tentang Penghapusan Sanksi Administrasi Pajak Kendaraan Bermotor [PKB] dan Pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2020.

Kebijakan ini harus dipatuhi para wajib pajak PKB. Kalau tidak, maka mereka akan kena sanksi.

Sedangkan kebijaksanaannya berupa perpanjangan kembali keringanan dan pemutihan, yaitu penghapusan denda dan bunga pajak kendaraan bermotor yang belum dibayar, penghapusan pokok pajak kendaraan bermotor yang menunggak lebih dari 1 tahun, serta pembebasan bea balik nama kendaraan bermotor. Kebijakan ini diadakan oleh Pemerintah agar kebijakan yang berupa peraturan tersebut tetap dapat diimplementasikan.

Adapun fungsi suatu kebijakan publik adalah sebagai infrastruktur [prasarana] dalam penggunaan sarana maupun sumber daya yang dimiliki oleh Pemerintah. Infrastruktur [prasarana] itu dapat diartikan sebagai fasilitas dasar agar sarana maupun sumber daya manusia dapat berfungsi dengan baik dan benar. Menurut **Andy Alfatih [2010]**, kebijakan publik menjadi infrastruktur yang digunakan untuk memanfaatkan sumber-sumber publik. Tanpa kebijakan, pemanfaatan sumber-sumber publik adalah bertentangan dengan hukum. Contoh, tanpa adanya suatu kebijakan, misalnya berupa surat keputusan seorang pejabat yang berwenang untuk mengizinkan pemakaian kendaraan dinas atau penggunaan uang negara, maka mobil dinas atau uang negara tersebut tidak boleh dipakai atau dipergunakan. Tanpa surat keputusan [kebijakan] pejabat yang berwenang tersebut, maka pemakaian mobil dinas atau penggunaan uang negara tersebut dapat saja dikatakan sebagai pencurian, penggelapan, atau korupsi dan itu dapat dihukum.

1.3. Implementasi Kebijakan Publik

Kebijakan publik adalah suatu konsep. Salah satu aspek yang lazim diteliti dari suatu kebijakan publik yakni implementasinya. Jadi

variable yang sering diteliti yaitu implementasi kebijakan publik. Variable inilah yang diteliti dari kebijakan pendirian Badan Usaha Milik Desa [BUMDes] dan merupakan konten utama dari buku ini pada bab-bab selanjutnya.

Dalam *Webster dictionary* dinyatakan bahwa *Implementation* artinya *Put rules into actions* atau *apply theory into practice*.

Menurut **Andy Alfatih [2010]**, implementasi kebijakan adalah penerapan apa yang diamanahkan oleh suatu kebijakan secara baik dan benar dalam rangka mencapai tujuan kebijakan tersebut.

Menurut George C. Edwards III (1980:1) *Policy Implementation is the stage of policy making between the establishment of a policy and the consequences of the policy for the people whom it affects*.

Riant Nugroho Dwijiwijoto (2003:158) menyatakan implementasi kebijakan adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya.

Randall B. Ripley dan Grace A. Franklin (1986:4), dalam buku mereka '*policy implementation and bureacracy*', menyatakan "*implementation is what happens after law are passed authorizing a program, a policy, a benefit, or some kind of tangible output*". Mereka juga mengutarakan bahwa implementasi terdiri dari serangkaian kegiatan sesuai dengan apa yang dinyatakan dalam kebijakan dalam rangka mencapai tujuan program dan hasil yang diinginkan oleh para pejabat Pemerintah.

Definisi lain menyatakan "*implementation is as the carrying out of a policy decision made by a public authority*", Daniel A. Mazmanian dan Paul A. Sabatier (1083:7).

Dalam buku '*implementation theory and practice: toward a third generation*' oleh Goggin, Bowman, Lester, and O'toole, JR (1990:46), diungkapkan ada 4 gaya (*styles*) implementasi, yaitu defiance, delay, strategic delay, serta compliance. Penjelasan ke 4 *styles* tersebut adalah sebagai berikut.

1. Defiance (Tentangan), yaitu penundaaan implementasi disertai dengan perubahan yang mengakibatkan terganggunya pencapaian tujuan.
2. Delay, yakni penundaan implementasi tanpa perubahan.
3. Strategic delay, yaitu penundaan implementasi disertai perubahan yang bertujuan membantu pencapaian tujuan.
4. Compliance, yakni kepatuhan pengimplementasian suatu kebijakan sesuai dengan yang seharusnya.

Sehubungan dengan implementasi ini, James March and Herbert Simon, dalam Goggin, Bowman, Lester, and O'toole, JR (1990:44), mengungkapkan tentang dimensi perilaku dalam implementasi. Menurut mereka, perilaku implementasi menggabungkan keputusan interpretatif dan penetapan tujuan – biasanya dicapai melalui tawar-menawar politik – dengan keputusan operasional dan administratif berkenaan dengan strategi- strategi yang paling tepat untuk dipakai dalam mencapai tujuan-tujuan khusus – yang biasanya dicapai melalui analisis.

1.4 .Makna Pemberdayaan Masyarakat

Secara etimologis, pemberdayaan dalam bahasa Inggris disebut dengan *empowerment*. Merujuk pada *Webster's New World*

Dictionary, empowerment, berasal dari kata kerja *empower*, berarti *giving power* atau *authority to, giving ability to, or enable*. Jadi berdasarkan asal-usul katanya, secara umum, pemberdayaan adalah satu pihak memberikan kekuasaan atau wewenang, atau memberi kemampuan kepada pihak lain sehingga pihak lain tersebut menjadi berdaya.

Pada dasarnya, pemberdayaan adalah serangkaian usaha yang dilakukan untuk meningkatkan kemampuan, pengembangan, dan kemandirian agar dapat berbuat lebih banyak dan lebih baik lagi terhadap lingkungan demi keadaan yang lebih baik. Pemberdayaan dapat dilakukan, baik terhadap diri sendiri maupun pihak lain. Jadi ia mencakup lingkungan internal maupun eksternal.

Dalam bukunya, Harry Hikmat (2006), mengutip beberapa definisi pemberdayaan menurut beberapa penulis. Definisi-definisi tersebut, diantaranya, menurut:

Schumacker, pemberdayaan adalah suatu keadaan dimana kelompok miskin dapat diberdayakan melalui pengetahuan dan kemandirian sehingga dapat berperan sebagai agen pembangunan.

Rappaport, pemberdayaan diartikan sebagai pemahaman secara psikologis pengaruh kontrol individu terhadap keadaan sosial, kekuatan politik dan hak-haknya menurut undang-undang.

Mc Ardle, pemberdayaan merupakan proses pengambilan keputusan oleh orang-orang secara konsekuen melaksanakan keputusan tersebut. Orang-orang yang telah mencapai tujuan kolektif diberdayakan melalui kemandiriannya, bahkan merupakan 'keharusan' untuk lebih diberdayakan melalui usaha mereka sendiri dan akumulasi pengetahuan, keterampilan, dan sumber lainnya dalam rangka

mencapai tujuan mereka tanpa bergantung pada pertolongan dari hubungan eksternal.

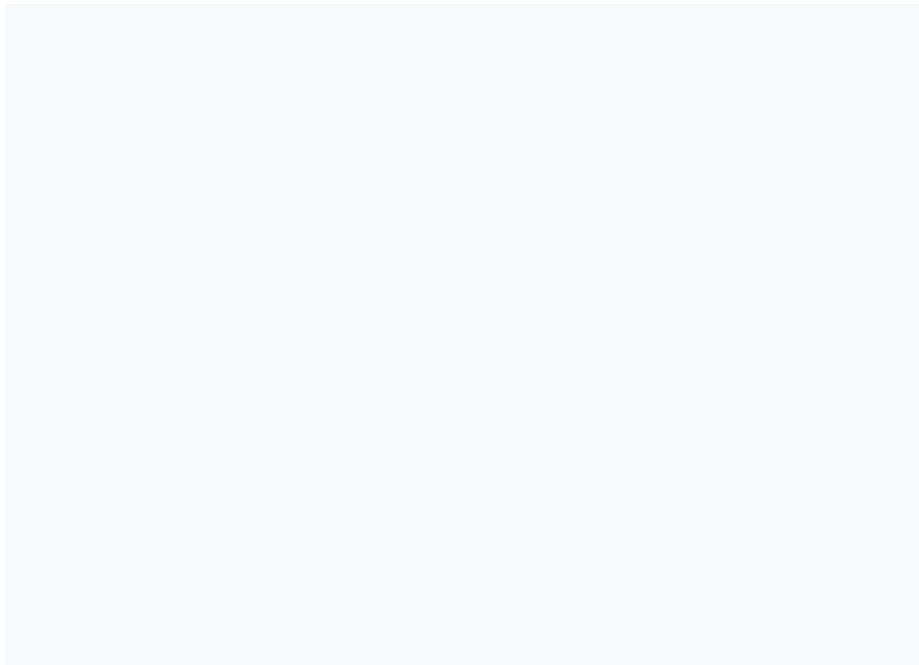
1.1. Hubungan Keberhasilan Implementasi Kebijakan dengan Pemberdayaa Masyarakat

Suatu kebijakan yang sudah dibuat tentunya harus diimplementasikan agar tujuan kebijakan yang dibuat tersebut dapat dicapai. Dalam mengimplementasikan kebijakan seringkali terdapat beberapa kendala – baik yang bersifat internal maupun eksternal dari pihak implementor/pelaksana kebijakan - yang berpotensi dapat menggagalkan pencapaian keberhasilan implementasi. Sehubungan dengan ini, maka adanya suatu kebijaksanaan dari pembuat kebijakan agar implementasi dapat berjalan dan lancar. Kebijaksanaan tersebut dapat berupa apa saja, misalnya, bantuan teknis, pemberian pelatihan manajemen, pengucuran dana, menyediakan jaringan kerja, membuat kebijakan pendukung, dan lain sebagainya. Kebijaksanaan seperti inilah yang – dalam konteks ini – disebut dengan pemberdayaan. Yaitu membuat pihak-pihak tertentu dari lemah menjadi berdaya.

Jadi pihak pembuat kebijakan publik – pada umumnya Pemerintah – tidak bisa hanya diam saja dan menyerahkan kepada implementor sepenuhnya untuk dapat mengatasi kendala-kendala yang dihadapi. Bila hal ini terjadi, berarti tidak ada pemberdayaan. Seandainya, pihak yang membuat kebijakan pemberdayaan sudah menganggap dengan sudah dibuatkannya kebijakan pemberdayaan berarti Pemerintah sudah memberikan pemberdayaan, maka pemberdayaan semacam ini adalah

pemberdayaan setengah hati. Besar kemungkinan, tujuan kebijakan tidak dapat dicapai.

Begitupun dengan implementasi Peraturan Daerah [Perda] Kabupaten Musi Rawas nomor 10 tahun 2013 tentang pendirian dan prosedur pengelolaan badan usaha milik desa [Bumdes], yang dibuat oleh Pemerintah Daerah, dalam hal ini, Pemerintah Daerah [Pemda] Kabupaten Musi Rawas [Mura], Provinsi Sumatera Selatan. Pemda Mura harus membuat kebijaksanaan dalam rangka keberhasilan pemberdayaan pendirian dan pengelolaan Bumdes di Kabupaten tersebut.



BAB II

Ringkasan Hasil Penelitian

Pada tahun 2019, penelitian tahun pertama, penelitian berjudul **Implementasi Kebijakan Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa [BUMDes] di Kabupaten Musi Rawas**. Berdasarkan judul tersebut, rumusan masalah yang dibuat, yaitu:

1. Bagaimana Implementasi Kebijakan Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa [BUMDes] di Kabupaten Musi Rawas ?
2. Faktor-faktor apa yang mempengaruhi Bagaimana Implementasi Kebijakan Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa [BUMDes] di Kabupaten Musi Rawas ?

Untuk menilai apakah implementasi kebijakan pembentukan dan pengelolaan badan usaha milik desa [BUMDes] di Kabupaten Musi Rawas berhasil atau gagal, maka teori yang dirujuk adalah teori yang dinyatakan dalam buku Randall B. Ripley dan Grace A. Franklin (1986 : 232-33) yang berjudul *Policy Implementation and Bureaucracy*. Dalam buku tersebut dinyatakan ada 3 parameter keberhasilan implementasi kebijakan publik, yakni:

1. Tingkat kepatuhan pada ketentuan yang berlaku (*degree of compliance*).
2. Lancarnya pelaksanaan rutinitas fungsi [*the smoothness of routin functions*]

3. Terwujudnya kinerja dan dampak yang dikehendaki [*the leading to desired performance and impact*].

Berdasarkan analisis data, dapat didapatkan informasi sebagai berikut:

1. Adanya kepatuhan implementasi kebijakan terhadap isi kebijakan [Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas nomor 10 tahun 2013 tentang pendirian dan prosedur pengelolaan Badan Usaha Milik Desa]. Tingkat kepatuhan tergolong tinggi dengan skor 271 dan berada pada kategori baik.
2. Pembentukan dan kepengurusan Bumdes [fungsi rutin] berjalan dengan lancar serta tergolong baik dengan skor 236.
3. Kinerja pengelolaan Bumdes juga baik dengan skor 268. Dampak implementasi kebijakan positif/baik dengan skor 240.

Keberhasilan implementasi kebijakan [Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas nomor 10 tahun 2013 tentang pendirian dan prosedur pengelolaan Badan Usaha Milik Desa] ini dikarenakan adanya keterlibatan para pemangku kepentingan [stake holders], dalam hal ini, Pemerintah Daerah Kabupaten Musi Rawas, para pengurus Bumdes, serta masyarakat dimana Bumdes tersebut berada.

Adapun, faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan tersebut adalah:

1. Rendahnya kompetisi, namun justru menurunkan motivasi untuk berinovasi
2. Persepsi tentang positifnya kedudukan BUMDes

3. Tiadanya pesaing karena keterisolasian wilayah bagi beberapa BUMDes.

Penelitian tahun pertama, dilanjutkan dengan tahun kedua, yaitu tahun 2020, dimana judul penelitiannya, yakni Dampak Implementasi Kebijakan Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa [BUMDes]. Sedangkan rumusan masalah yang diangkat adalah bagaimana dampak implementasi kebijakan pembentukan dan pengelolaan badan usaha milik desa.

Dampak implementasi kebijakan publik dapat berupa dampak terhadap beberapa aspek seperti berikut ini.

Aspek Ekonomi: Peningkatan Modal Usaha

1	bantuan modal
2	bantuan pelatihan
3	bantuan pendampingan
4	bantuan usaha pihak lain
5	pinjaman usaha untuk pengembangan

Ekonomi: Kemajuan Usaha

6	perbaikan tempat usaha
7	produk usaha meningkat
8	teknologi, peralatan, perlengkapan dan usaha
9	pemasaran produk makin luas
10	permintaan pasar luas

Aspek Ekonomi: Keuntungan Usaha

- 11 | usaha menguntungkan
- 12 | keuntungan usaha meningkat

Aspek Sosial: Keterkaitan Sosial Dengan Bumdes

- 13 | memiliki jabatan penting
- 14 | masyarakat respek pada jabatan
- 15 | peningkatan usaha sejak memimpin

Aspek Sosial: Keikutan Asosiasi

- 16 | bergabung dengan asosiasi
- 17 | menjadi jabatan/pengurus di asosiasi
- 18 | asosiasi tingkat kabupaten

Aspek Sosial: Tanggapan Masyarakat Terhadap Bumdes

- 19 | masyarakat mendukung bumdes
- 20 | masyarakat tidak peduli sama
Bumdes
- 21 | masyarakat menolak Bumdes

Aspek Lingkungan: Ketersediaan Bahan Baku Usaha

- 22 | bahan baku dari desa
- 23 | bahan baku alam
- 24 | kemudahan mendapatkan produk

Aspek Lingkungan: Perlakuan Sisa Bahan Baku Produksi

- 25 | menyisahkan bahan baku (limbah)
- 26 | limbah bahan baku di daur ulang
- 27 | limbah dibuang sembarang

Aspek Politik: Keterlibatan Unsur Parpol

28 | unsur parpol pendirian bumdes

29 | bentuk keterlibatan parpol

30 | unsur parpol intens

Aspek Politik: Afiliasi/Menjalin Hubungan Dengan Parpol

31 | hubungan khusus dengan parpol

32 | pengurus dari parpol

33 | bumdes mewakili kepentingan parpol

34 | pengarahan yang mengarah ke parpol

Mengenai bagaimana dampak implementasi kebijakan publik, ini maksudnya apakah dampak terhadap beberapa aspek tersebut di atas cenderung ke positif atau negatif. Sehubungan dengan ini, dampaknya:

Dampak terhadap aspek ekonomi: $188, 262, 225 = 225 >$ baik atau positif. Ini maknanya dengan adanya Bumdes serta pengelolaannya yang baik, maka dampaknya terhadap ekonomi desa positif.

Dampak aspek sosial: $225, 211, 176 = 204 >$ baik atau positif. Informasi ini berarti dengan adanya Bumdes serta pengelolaannya yang baik, maka dampaknya terhadap kehidupan sosial desa positif.

Dampak aspek lingkungan: $176, 169, = 173 >$ cukup atau cukup positif. Dengan kategori seperti ini, dapat dipahami bahwa dengan adanya Bumdes serta pengelolaannya yang cukup baik, maka dampaknya terhadap lingkungan desa cukup positif.

Dampak aspek politik: 306 > sangat baik atau sangat positif. Data ini mengindikasikan bahwa dengan adanya Bumdes serta pengelolaannya yang sangat baik, maka dampaknya terhadap perpolitikan masyarakat desa sangat positif. Artinya, masyarakat tidak terpengaruh dengan kepentingan politik, sehingga mereka tetap bersatu dan damai.

Secara kuantitatif, hasil analisis menunjukkan sebagai berikut.

Tabel 3.6.

Rekapitulasi Skor dan Kategori Aspek Ekonomi: Peningkatan Modal Usaha Per Indikator

No	Indikator	Total Skor	Kategori
1	Bantuan Modal Usaha dari Pemda	143	Tidak baik
2	Bantuan Pelatihan dari Pemda	256	Baik
3	Bantuan Pendampingan dari Pemda	268	Baik
4	Bantuan usaha dari pihak lain	164	Tidak baik
5	Pinjaman usaha dari pihak lain	112	Sangat tidak baik
	Skor aspek rata-rata Aspek Ekonomi: Peningkatan Modal Usaha	188	CUKUP

Sumber: Total skor masing-masing indikator

Tabel 3.11

Rekapitulasi Skor dan Kategori Aspek Ekonomi: Kemajuan Usaha Per Indikator

No	Indikator	Total Skor	Kategori
1	Adanya Perbaikan Tempat Usaha	259	Baik
2	Jumlah Produksi Usaha Meningkatkan	245	Baik
3	Perbaikan Teknologi, Peralatan, Perlengkapan Usaha	198	Cukup
4	Semakin Luasnya Pemasaran Produk	197	Cukup
	Skor aspek rata-rata Aspek Ekonomi: Kemajuan Usaha	225	BAIK

Sumber: Total skor masing-masing indikator

Tabel 3.14

Rekapitulasi Skor dan Kategori Aspek Ekonomi: Keuntungan Usaha Per Indikator

No	Indikator	Total Skor	Kategori
1	Usaha Bumdes Memberikan Keuntungan	270	Baik
2	Keuntungan Bumdes Meningkatkan	255	Baik
	Skor aspek rata-rata Aspek Ekonomi: Keuntungan Usaha	262	BAIK

Sumber: Total skor masing-masing indikator

Tabel 3.18.

Rekapitulasi Skor Dan Kategori Aspek Sosial dalam Kaitannya dengan Status Sosial Per Indikator

No	Indikator	Total Skor	Kategori
1	Pengurus Bumdes yang Menjadi Responden ini Mempunyai Jabatan yang Penting	269	Baik
2	Adanya Respek Masyarakat terhadap Jabatan di Bumdes	265	Baik
3	Usaha Bumdes Maju selama Masa Jabatan	270	Baik
	Skor aspek rata-rata Aspek Sosial dalam Kaitannya dengan Status Sosial	225	BAIK

Sumber: Total skor masing-masing indikator

Tabel 3.22.

Rekapitulasi Skor Dan Kategori Aspek Sosial dalam Kaitannya dengan Keikut-sertaan pada Asosiasi Per Indikator

No	Indikator	Total Skor	Kategori
1	Keikut-sertaan Bumdes pada Asosiasi	247	Baik
2	Memiliki Jabatan/Menjadi Pengurus Asosiasi	134	Tidak Baik
3	Keikutan Asosiasi Tingkat Kabupaten	252	Baik
	Skor rata-rata	211	CUKUP

Sumber: Total skor masing-masing indikator

Tabel 3.26.

Rekapitulasi Skor Dan Kategori Aspek Sosial, Khususnya Tanggapan Masyarakat Terhadap Bumdes Per Indikator

No	Indikator	Total Skor	Kategori
1	Dukungan masyarakat thdp Bumdes	255	Baik
2	Masyarakat tidak setuju tidak peduli thdp Bumdes	134	Tidak Baik
3	Masyarakat menolak Bumdes	138	Tidak Baik
	Skor rata-rata	176	CUKUP

Sumber: Total skor masing-masing indikator

Tabel 3.30.

Rekapitulasi Skor Dan Kategori Aspek Lingkungan, khususnya Ketersediaan bahan baku usaha, Bumdes Per Indikator

No	Indikator	Total Skor	Kategori
1	Bahan Baku Bisnis Bumdes Dari Desa	184	cukup
2	Bahan Baku Yang Bersifat Alami Dari Desa Sendiri	179	cukup
3	Kemudahan Mendapatkan Baku	200	cukup
	Skor rata-rata	176	CUKUP

Sumber: Total skor masing-masing indikator

Tabel 3.34

Rekapitulasi Skor Dan Kategori Aspek Lingkungan, Khususnya
Perlakuan Terhadap Sisa Bahan Baku Produksi Bumdes Per Indikator

No	Indikator	Total Skor	Kategori
1	Produksi Bumdes menimbulkan limbah [sisa bahan baku]	165	Tidak Baik
2	Limbah Bahan Baku didaur ulang	201	Cukup
3	Limbah dibuang sembarangan	142	Tidak Baik
	Skor rata-rata	169	CUKUP

Sumber: Total skor masing-masing indikator

Tabel 3.38

Rekapitulasi Skor Dan Kategori Aspek Politik, Khususnya Perlakuan
Terhadap Sisa Bahan Baku Produksi Bumdes Per Indikator

No	Indikator	Total Skor	Kategori
1	Tidak Ada Keterlibatan Unsur Parpol dalam Pendirian Bumdes	306	Sangat Baik
2	Tidak Ada Bentuk Apapun Keterlibatan Unsur Parpol.	306	Sangat Baik
3	Tidak Ada Keterlibatan Parpol Secara Intens	306	Sangat Baik
	Skor rata-rata	306	Sangat Baik

Sumber: Total skor masing-masing indikator

Terakhir, yakni penelitian tahun ke tiga, yaitu tahun 2021, judul penelitiannya adalah Kebijakan Pemberdayaan Dan Pemasaran Produk Bumdes Berbasis *E-Commerce* Di Kabupaten Musi Rawas. Adapun rumusan masalah penelitiannya adalah apakah Kebijakan Pemberdayaan Bumdes Dan Pemasaran Produknya berbasis *E-Commerce* [bagaimana cara pemasaran produk Bumdes] ?

Penelitian menunjukkan bahwa cara pemasaran produk atau barang dagangan Bumdes di Kabupaten Musi Rawas bersifat beragam. Adanya yang memasarkan secara langsung [bisa dilihat secara langsung di tempat penjualan] atau off line, serta ada juga yang melalui media [on line].

Pemasaran melalui media [on line] dilakukan dengan menggunakan bermacam-macam aplikasi, misalnya face book dan whatsapp. Secara rinci, dapat dilihat dalam tabel di bawah ini.

4.2. Gambaran Cara Pemasaran Produk Bumdes

No	BUMDes	Jenis Usaha	Cara Pemasaran Produk <i>e-commerce</i>
(1)	(2)	(3)	(6)
1	Tri Jasa Karya	Simpan Pinjam	offline
2	Tri Jasa Karya	Simpan Pinjam	offline
3	Sidomulyo(L sidoharjo)	Pakan Ikan lele	Offline dan online
4	Sidomulyo (L sidoharjo)	Pakan Ikan lele	Offline dan online
5	Peduli Sesama	Jenis Usaha Simpan Pinjam, Bagi Hasil modal Usaha Batu Bata	Offline
6	Peduli Sesama	Jenis Usaha Simpan Pinjam, Bagi Hasil modal	Offline

		Usaha Batu Bata	
7	Cahaya Bening	Sewa Tempat, Sewa Kontainer, Angkringan	Offline dan Online (aplikasi facebook)
8	Cahaya Bening	Sewa Tempat, Sewa Kontiner, Angkringan	Offline dan Online (aplikasi facebook)
9	Sejahtera	ATK, Konveksi, Bibit, Isi Ulang air minum	Online (facebook dan whatshap) dan offline
10	Sejahtera	ATK, Konveksi, Bibit, Isi Ulang air minum	Online (facebook dan whatshap) dan offline
11	Unggul Sejahtera	Pamsimas, ternak ikan, Shopepay, Gas Elpiji	Online (facebook dan whatshap) dan offline
12	Unggul Sejahtera	Pamsimas, ternak ikan, Shopepay, Gas Elpiji	Online (facebook dan whatshap) dan offline
13	Cintra Mandiri	Perdagangan, sewa taruf, gaduhan hewan, Gas LPG	Online (facebook dan whatshap) dan offline
14	Maju Bersama	Simpan Pinjam	Online (facebook dan whatshap) dan offline
15	Jaya Mulya	Perdagangan Tempat Wisata	Online (facebook dan whatshap) dan offline
16	Nur Cahaya	Jenis Usaha: Perdagangan, Gaduhan Sapi	Online (facebook dan whatshap) dan offline
17	Petong Mandiri	Galon isi Ulang (Kangen Water, peternakan)	Online (facebook dan whatshap) dan offline
18	Peduli bersama	Simpan Pinjam	Online (facebook dan whatshap) dan offline
19	Sayosae	Perdagangan LPG	Online (facebook dan whatshap) dan offline
20	Maju Bersama (triwikaton)	Konveksi Baju Sekolah	Online (facebook dan whatshap) dan offline

Sumber: Data Primer, 2021

BAB III

Hasil Kajian Pemberdayaan Badan Usaha Milik Desa
[BUMDes]

Judul Asli Penelitian

Implementasi Kebijakan Pembentukan dan Pengelolaan
Badan Usaha Milik Desa [BUMDes]
di Kabupaten Musi Rawas

Dalam rangka membangun desa, maka diperlukan dana pembangunan. Ada beragam sumber dana pembangunan desa yang dapat diusahakan, dimana salah satunya adalah melalui Badan Usaha Milik Desa [BUMDes]. Setiap desa, khususnya di daerah dimana penelitian ini dilakukan yaitu Kabupaten Musi Rawas, Provinsi Sumatera Selatan. Melalui Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas nomor 10 tahun 2013 tentang pedoman tata cara pembentukan dan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa [BUMDes] di Kabupaten Musi Rawas.

Penelitian tentang pemberdayaan BUMDes di Kabupaten Musi Rawas, Provinsi Sumatera Selatan ini dilakukan selama 3 tahun berturut-turut. Tahun pertama, yaitu 2019, penelitiannya berjudul “ Implementasi Kebijakan Pembentukan dan Pengelolaan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa [BUMDes] di Musi Rawas. Selanjutnya, pada tahun 2020, diteruskan dengan penelitian yang kedua dengan judul “Dampak Implementasi Kebijakan Pendirian BUMDes (Studi Di Beberapa BUMDes Di Kecamatan Musi Rawas, Sumsel)”. Terakhir, pada tahun 2021, yang diteliti adalah berkenaan

dengan cara pemasaran produk Bumdes. Adapun secara lengkap judul penelitiannya yakni “Kebijakan Pemberdayaan Dan Pemasaran Produk Bumdes Berbasis *E-Commerce* Di Kabupaten Musi Rawas”.

Latar belakang meneliti hal tersebut di atas adalah karena jumlah Bumdes di Kabupaten Musi Rawas, kekayaan alam di Kabupaten ini cukup banyak serta beragam, dan ada indikasi Bumdes tersebut ada yang belum berkembang dengan baik.

Tabel 2.1.
Jumlah BUMDes per Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan

Nomor	Nama Kabupaten/Kota	Jumlah Bumdes
1	Banyuasin	131
2	Empat Lawang	74
3	Lahat	18
4	Muara Enim	23
5	Musi Banyuasin	5
6	Musi Rawas	174
7	Musi Rawas Utara	9
8	Ogan Ilir	96
9	Ogan Komering Ilir	34
10	Ogan Komering Ulu	12
11	Ogan Komering Ulu Selatan	4
12	Ogan Komering Ulu Timur	109

Sumber : www.datin.kemendes.go.id

Rumusan masalah penelitian dengan judul seperti di atas adalah bagaimana implementasi Kebijakan Pembentukan dan Pengelolaan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa [BUMDes] di

Kabupaten Musi Rawas ? Faktor-faktor apa yang mempengaruhi implementasi kebijakan tersebut?

Permasalahan penelitian yang pertama di atas menemukan jawaban berupa penilaian [assessment] apakah implementasi kebijakan tersebut berhasil atau gagal. Jadi penelitian ini bersifat deskriptif evaluatif dengan metode kuantitatif. Dalam rangka menilai atau mengevaluasi sesuatu hal, dalam konteks ini adalah implementasi kebijakan, maka diperlukan suatu pedoman untuk penilaian. Disini, peneliti berpedoman atau merujuk ke pada teori, yaitu teori keberhasilan implementasi kebijakan publik. Dalam buku yang ditulis oleh Randall B. Ripley dan Grace A. Franklin yang berjudul *Policy Implementation and Bureaucracy*. Dalam buku mereka yang berjudul *Policy Implementation and Bureacracy*, Randall. B. Ripley and Grace A. Franklin (1986 : 232-33), menulis tentang *three conceptions relating to successful implementation* sambil menyatakan:

“the notion of success in implementation has no single widely accepted definition. Different analists and different actors have very different meanings in mind when they talk about or think about successful implementtion. There are three dominant ways of thinking about successful implementation”

Sehubungan dengan *three dominant ways of thinking about successful implementation* tersebut, selajutnya mereka menyatakan ada *analists* dan *actors* yang berpendapat bahwa implementasi kebijakan yang berhasil dinilai, pertama, memakai ukuran tingkat kepatuhan (*degree of compliance*). Namun, yang kedua, ada juga yang mengukur dengan adanya kelancaran rutinitas fungsi. Oleh karena

Ripley dan Franklin menganggap kedua *parameter* tersebut “*is too narrow and have limited political interest*” [*the smoothness of routine functions*], maka mereka mengajukan *perspective* yang ketiga, yaitu dampak yang diinginkan [*the leading to desired performance and impact*]. Mereka mengutarakan ini dengan mengatakan “*we advance a third perspective, which is that successful implementation leads to desired... impact from whatever program is being analyzed*”. Jadi ada 3 perspektif untuk mengukur keberhasilan implementasi kebijakan.

Dalam penelitian ini, ketiga perspektif itu digunakan sebagai pedoman untuk mengukur keberhasilan implementasi kebijakan publik. Hal ini dikarenakan ketiga perspektif tersebut tidak kontradiktif satu dengan yang lain, bahkan mereka saling melengkapi sehingga ketiga perspektif tersebut lebih *holistic*, oleh karenanya cocok dengan kondisi penelitian ini. Ketiga *measurements* atau parameter tersebut adalah:

1. Tingkat kepatuhan pada ketentuan yang berlaku (*degree of compliance*).
2. Lancarnya pelaksanaan rutinitas fungsi [*the smoothness of routine functions*]
3. Terwujudnya kinerja dan dampak yang dikehendaki [*the leading to desired performance and impact*].

Teori tersebut diatas dioperasionalisasikan seperti berikut ini.

Tabel 2.2.

Operasionalisasi Variable Penelitian

Variable	Dimensi	Indikator
<p>Implementasi Kebijakan Publik [Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas nomor 10 tahun 2013 tentang pedoman tata cara pembentukan dan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa [BUMDes] di Kabupaten Musi Rawas].</p>	<p>Tingkat Kepatuhan</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Usaha sesuai dengan potensi desa 2. Pendirian Bumdes berdasarkan Peraturan Desa 3. Pendirian Bumdes berdasarkan Konsensus masyarakat desa 4. Organisasi Bumdes terpisah dari organisasi Pemerintah Desa 5. Organisasi Bumdes terdiri dari penasehat/komisaris dan pelaksana operasional 6. Kepala Desa bertindak sebagaipenasehat / komisioner Bumdes 7. Pelaksan operasiona Bumdes Terdiri dari manajer dan ketua Unit usaha 8. Keuntungan usaha harus dibagi dengan pemilik modal 9. Manajer Bumdes harus membuat Laporan ke Kades 10. Bumdes harus diawasi Badan Perwakilan Desa 11. Manajer Bumdes harus menerapkan good cooperate governance
	<p>Kelancaran Fungsi-fungsi Rutin.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya ketersediaan modal yg Cukup 2. Adanya SDM yang

		<p>memadai</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Tersedianya anggaran yg cukup 4. Perlengkapan kerja tersedia cukup 5. Tempat kerja memadai baik 6. Peralatan tersedia cukup.
	<p>Terwujudnya kinerja</p> <p>dan</p> <p>Dampak yang diinginkan</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pendapatan desa meningkat 2. Tersedianya kesempatan Berusaha 3. Adanya penggunaan potensi desa 4. Adanya kemudahan pemenuhan 5. kebutuhan warga desa 6. Warga desa [lebih] sejahtera 7. Citra Pemerintah Desa positif.

Indikator-indikator di atas dibuat menjadi pernyataan dalam kuesioner dan ditanyakan kepada para responden yang berjumlah 46 pengurus BUMDes. Jawaban terhadap pernyataan yang diajukan kepada para responden terdiri dari 5 opsi – merujuk kepada skala Likert – yaitu Sangat Setuju [SS], Setuju [S], Ragu-ragu [R], Tidak Setuju [TS}, dan Sangat Tidak Setuju [STS].

Hasil Penelitian

Sebelum penyajian hasil penelitian, akan dibuatkan dan dipresentasikan dulu tabel yang berisikan klasifikasi indikator berdasarkan nilai [skor] yang diperoleh masing-masing indikator. Tabel tersebut adalah sebagai berikut:

Table 2.3.

Klasifikasi Kualitas Indikator Berdasarkan Pada Rentang Skornya

Rentang Skor Indikator	Klasifikasi Kualitas Indikator
64 - 115	Sangat Tidak Baik
116 - 167	Tidak Baik
168 - 219	Cukup
220 - 271	Baik
➤ 272	Sangat Baik

Tabel Klasifikasi Kualitas Indikator Berdasarkan Pada Rentang Skornya di atas dibuat dengan cara responden penelitian, yaitu 64 orang yang mewakili bumdes, diberi kuesioner yang berisi 23 pernyataan yang harus dijawab. Tiap pernyataan dalam kuesioner disediakan 5 alternatif jawaban – menurut skala Likert – yaitu sangat setuju [simbol skornya 5], setuju [4], ragu-ragu [3], tidak setuju [2], dan sangat tidak setuju [1]. Untuk mendapatkan kategori nilai dari perolehan skor, terdapat kriteria tertentu sebagai berikut:

1. Skor kumulatif untuk setiap item [pernyataan] adalah nilai dari setiap item yang merupakan jawaban dari 64 responden.
2. Untuk mendapatkan skor kumulatif, jumlah responden dikalikan dengan skala nilai terbesar dan terkecil dalam skala penilaian. Nilai skala terbesar adalah 5, sedangkan nilai skala terkecil yaitu 1. Perhitungannya, yakni skor kumulatif tertinggi adalah $64 \times 5 = 320$. Sedangkan skor kumulatif terendah adalah $64 \times 1 = 64$.

3. Untuk mendapatkan rentang skor, skor kumulatif tertinggi dikurangi skor kumulatif terendah, kemudian hasilnya dibagi jumlah skala penilaian, dimana $320 - 64 = 256$. Lalu hasil pengurangan, yaitu $256 : 5 = 51,2 = 51$. Dengan demikian range [rentang] skor yaitu 51. Hasil rentang skor dan kategori indikatornya dapat dilihat didalam tabel 2.3. di atas.

Data hasil penelitian disajikan dan dianalisis per indikator dari masing-masing dimensi. Hal ini akan dimulai dari indikator ke satu dari dimensi pertama.

3.1. Dimensi Tingkat Kepatuhan terhadap Kebijakan Pendirian BUMDes

Salah satu tujuan pembentukan Bumdes adalah pemanfaatan potensi desa. Secara umum, banyak desa di Kabupaten Musi Rawas berada di dekat hutan, bukit, dan sungai. Oleh karena itu, desa-desa tersebut mempunyai potensi sumber daya alam yang bagus. Sehubungan dengan apakah usaha Bumdes sesuai dengan potensi yang ada di masing-masing desa, jawabannya adalah sebagai berikut.

Table 2.4.
Hasil Secara Kuantitatif Jawaban Responden terhadap
Indikator -indikator
Tingkat Kepatuhan terhadap Kebijakan tentang BUMDes

No	Pernyataan	Pilihan Jawaban					SF	SH	Per sen tas e
		ST S (1)	TS (2)	R (3)	S (4)	SS (5)			
1.	Usaha Bumdes sesuai dengan potensi desa	20	15	7	15	7	166	320	100 %
2.	Pendirian Bumdes sesuai dengan Peraturan	0	0	0	40	24	280	320	100 %
3	Pendirian Bumdes berdasar konsensus	0	0	0	21	43	299	320	100 %
4	Pengelolaan Bumdes terpisah dengan Pemerintah Desa	0	0	2	22	40	294	320	100 %
5	Pengurus Bumdes terdiri dari penasehat dan pelaksana	0	0	0	24	40	296	320	100 %
6	Kades berperan sbg penasehat/komisaris	17	15	0	10	22	197	320	100 %
7	Pelaksana Bumdes terdiri dari manager & ketua unit usaha	0	0	0	10	54	310	320	100 %
8	Keuntungan Bumdes harus dibagi dengan pemilik modal	0	0	7	27	30	279	320	100 %
9	Manager Bumbes harus membuat laporan untuk Kades	0	0	0	10	54	310	320	100 %
10	Bumdes diawasi oleh Badan Perwakilan Desa	4	5	5	20	30	259	320	100 %

11	Pengelola Bumdes terapkan prinsip2 GCG	0	0	0	33	31	287	320	100 %
	Skor rata-rata	-	-	-	-	-	271	-	100 %

Sumber : Kuesioner, 2019.

Keterangan:

Skor Frekuensi [SF] = Pilihan jawab x Skor

Skor Hasil [SH] = Jumlah responden yang jawab x 5

Skor Rata-rata = (SF X 100%) : SH

STS > Sangat Tidak Setuju, TS > Tidak Setuju, R > Ragu-ragu,

S > Setuju, SS > Sangat Setuju

Table 2.4. diatas menunjukkan bahwa skor indikator “usaha sesuai dengan potensi desa” adalah sebesar 166. Ini artinya 65.5 % responden tidak setuju dengan pernyataan tersebut. Merujuk kepada table 2.3. tentang klasifikasi kualitas indikator berdasarkan pada kategori rentang skor penilaian maka indikator pertama ini termasuk dalam kategori TIDAK BAIK. Ditinjau dari dimensi kepatuhan, maka sebagian besar Bumdes tidak mematuhi kebijakan pendirian Bumdes. Hal ini disebabkan karena pengelola Bumdes mempunyai persepsi yang beda tentang jenis usaha Bumdes. Alasan sebagian besar responden yang tidak mendukung ketentuan tersebut karena potensi desa yang ada terbatas hanya pada sumber daya alam tertentu saja, seperti buah coklat, kopi, kebun karet, kebun kelapa sawit dan ikan sungai. Sementara, kebutuhan warga desa sangat beragam. Kesenjangan inilah yang mereka pandang sebagai peluang bisnis yang sangat menjanjikan. Lagi pula, jika semua Bumdes melakukan bisnis yang sama, harga produk akan murah karena pasokan melimpah.

Argumen responden yang tidak setuju tersebut cukup beralasan, karena dalam bisnis, menarik pelanggan melalui produk sangat penting untuk kemajuan dan keuntungan bisnis. Seperti yang dinyatakan oleh Neil Kokemuller [2018] dalam artikelnya bahwa “diferensiasi produk berarti bahwa produk Anda memiliki satu atau lebih atribut yang membedakannya dari pesaing. Meskipun memiliki kualitas produk yang baik, kemampuan untuk mengembangkan dan mengartikulasikan kualitas atau fitur yang secara jelas membuat satu produk lebih baik dari pesaing adalah penting untuk menarik konsumen yang berorientasi pada nilai. Jelas terlihat bahwa indikator pertama menunjukkan tidak ada kepatuhan.

Mengenai indikator kedua, pembentukan Bumdes harus di bawah peraturan desa. Semua - 100 % - responden mematuhi itu. Skor tersebut adalah 280 dan tergolong Sangat Baik. Hal ini wajar saja karena secara teknis hanya Perdes yang bisa mengatur kebutuhan desa secara detail dan akomodatif. Indikator selanjutnya adalah 'pembentukan Bumdes berdasarkan musyawarah'. Untuk ini, 100% responden setuju. Skor berada pada 299 yang dipahami sebagai Sangat Baik. Bisa jadi seperti ini karena musyawarah dalam mengambil keputusan secara filosofis sudah menjadi cara Indonesia. Itu sesuai dengan Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia. Dapat disimpulkan bahwa kepatuhannya ada dan derajatnya tinggi. Sedangkan persepsi responden tentang Bumdes yang harus dipisahkan dari pemerintah desa berada pada kategori Sangat Baik. Persentasenya 100% dan skornya 294. Dapat diterima bahwa pengelolaan kedua urusan itu harus dipisahkan. Organisasi yang berbeda dengan tugas yang berbeda harus memiliki manajemen masing-masing untuk

menghindari konflik kepentingan. Indikator kelima, Bumdes harus terdiri dari pembina dan pelaksana operasional, didukung dengan baik oleh seluruh responden. Mereka sangat setuju akan hal ini karena para pelaksana membutuhkan beberapa saran untuk mengarahkan pekerjaan ke tujuan. Hasilnya, 100% atau 64 responden menjawab setuju dan sangat setuju dengan pernyataan yang diajukan. Skor tersebut adalah 296 dan tergolong Sangat Baik.

Ketika ungkapan lain - Kepala Desa bertindak sebagai penasihat / komisaris - disampaikan kepada responden, hanya 50% atau 32 orang yang disetujui. Sedangkan 50% lainnya menolak. Skor tersebut adalah 197. Berada pada rentang skor antara 168 hingga 219 yang berarti termasuk dalam kategori Cukup. Ketika hasil ini ditelaah lebih lanjut, responden yang tidak mendukung menjawab bahwa Kepala Desa sebaiknya fokus saja pada pekerjaannya sebagai kepala desa, agar bisa bekerja secara profesional. Sementara itu, sumber data pendukung berpendapat bahwa sebagai kepala desa wajar jika ia menjadi komisaris untuk Bumdes di desanya. Kalimat selanjutnya berbunyi “pelaksana operasi terdiri dari manajer & kepala unit bisnis“. Terhadap hal ini, sebagian besar responden – 54 orang – sangat setuju. 10 responden lainnya hanya setuju. Skor tersebut adalah 310 dan dikategorikan Sangat Baik. Adalah umum jika 2 unit dasar itu ada dalam sebuah perusahaan bisnis. Indikator kedelapan dari dimensi derajat kepatuhan adalah “Laba harus dibagi dengan pemilik modal”. Skor pengukuran adalah 279 dan berada pada posisi Sangat Baik. Secara persentase, 89% responden mematuhi aturan ini. Bagi hasil adalah praktik umum di antara pemegang saham. Selanjutnya 64 responden diminta untuk menjawab pernyataan tersebut, pengelola

Bumdes harus membuat laporan kepada kepala desa. Hal ini mengakibatkan semua responden mendukung hal tersebut. Ketentuan yang ditaati. Dimasukkan ke dalam klasifikasi Sangat Baik karena mendapat skor 310.

Ketaatan lain yang terjadi adalah para pengurus Bumdes tidak keberatan diawasi oleh pihak lain yaitu Badan Perwakilan Desa. Terbukti saat mereka menjawab pernyataan tersebut, Bumdes disupervisi oleh badan perwakilan desa, sebagian besar – 50 responden atau 78% – mendukungnya. Skor tersebut adalah 259. Oleh karena itu, tergolong Baik. Last but not least adalah indikator terakhir dari tingkat kepatuhan. Memang GCG harus diterapkan oleh manajemen Bumdes. Untuk pernyataan ini, semua responden menganjurkan penerimaan mereka. Fakta bahwa 33 jawaban menunjukkan setuju. 31 lainnya menyatakan sangat setuju. Dapat dipahami bahwa 100% responden memenuhi pasal ini. Indikator ini ditempatkan pada level Sangat Baik. Skornya adalah 287. Berkaitan dengan pentingnya kepatuhan dalam pekerjaan, Gary Trainor [2012] mendukung Ripley dan Franklin dengan menyatakan “ketika menyangkut bisnis dan manajemen perusahaan, kepatuhan mengacu pada perusahaan yang mematuhi semua hukum dan peraturan hukum di tentang bagaimana mereka mengelola bisnis, staf mereka, dan perlakuan mereka terhadap konsumen mereka. Konsep kepatuhan adalah untuk memastikan bahwa perusahaan bertindak secara bertanggung jawab. Ketika datang ke bisnis dan manajemen perusahaan, kepatuhan mengacu pada perusahaan yang mematuhi semua hukum dan peraturan hukum tentang bagaimana mereka mengelola bisnis, staf mereka, dan perlakuan mereka terhadap

konsumen mereka. Konsep kepatuhan adalah memastikan bahwa korporasi bertindak secara bertanggung jawab”.

Perlu diingatkan di sini bahwa jika indikatornya positif, maka dimensinya juga positif. Karena indikator sudah menjadi ukuran dimensi. Dan sebaliknya.

Dari pembahasan tersebut diketahui bahwa ada satu indikator – indikator pertama – tergolong Kurang Baik. Salah satu indikator, indikator keenam, sudah Cukup. Satu lagi indikator – indikator nomor 10 – dikelompokkan menjadi Baik. Terdapat 8 indikator yang masuk dalam kategori Sangat Baik. Rata-rata skor dimensi derajat kepatuhan adalah 271 dan termasuk kategori Baik. Secara umum terdapat 9 indikator yang menunjukkan kepatuhan dan sangat tinggi. Dapat disimpulkan bahwa dalam hal pemenuhan derajat, mengacu pada teori yang dikemukakan dalam karya Randall. B. Ripley dan Grace A. Franklin, implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 10 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pendirian dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa di Kabupaten telah berhasil dilaksanakan.

3.2. Dimensi Kelancaran Rutinitas Fungsi

Indikator-indikator selanjutnya yang akan dianalisis adalah yang termasuk dalam dimensi kedua, kelancaran fungsi-fungsi rutin. Indikator-indikator tersebut juga akan dibahas satu per satu. Untuk datanya lihat tabel 2.5.

Table 2.5.

Hasil Secara Kuantitatif Jawaban Responden terhadap Indikator-indikator Kelancaran Fungsi Rutin

No	Pernyataan	Pilihan Jawaban					SF	SH	Persen tase
		STS (1)	TS (2)	R (3)	S (4)	SS (5)			
1.	Adanya kecukupan modal	8	10	11	31	4	175	320	100%
2.	SDM yang memadai	5	5	7	27	20	244	320	100%
3	Adanya anggaran yg cukup	4	7	13	30	10	227	320	100%
4	Tersedianya perlengkapan yang memadai	4	5	11	20	24	247	320	100%
5	Tempat berusaha yang layak	2	4	2	40	16	256	320	100%
6	Peralatan kerja yang memadai	2	4	4	24	30	269	320	100%
	Total skor	-	-	-	-		236	-	100%

Sumber : Kuesioner, 2019.

Keterangan:

Skor Frekuensi [SF] = Pilihan jawab x Skor

Skor Hasil [SH] = Jumlah responden yang jawab x 5

Skor Rata-rata = (SF X 100%) : SH

STS > Sangat Tidak Setuju, TS > Tidak Setuju, R > Ragu-ragu,

S > Setuju, SS > Sangat Setuju

Data pada tabel 2.5. di atas, khususnya terkait ketersediaan permodalan yang memadai bagi Bumdes di Kabupaten Musi Rawas, menunjukkan bahwa sebagian responden menolak pernyataan tersebut. Itu berarti dalam persepsi mereka itu tidak benar. Namun demikian, sebagian besar responden memiliki sudut pandang yang sangat berbeda dengan yang tidak setuju. Mereka sebanyak 54,69% sangat yakin dan mendukung pernyataan tersebut. Indikator pertama kelancaran fungsi rutin ini berada pada level Cukup karena skornya hanya 175. Terlepas dari modal usaha yang memadai, faktanya Bumdes itu tetap menjalankan usahanya dan selalu siap untuk mendapatkan bantuan dari pihak mana pun untuk permodalan lebih.

Berbeda dengan indikator pertama, parameter kedua kelancaran dimensi fungsi rutin tampak sedikit lebih baik. Terdapat 47 responden atau 73,44 % yang sangat yakin dengan kecukupan SDM Bumdes Kabupaten Musi Rawas. Kepengurusan masing-masing Bumdes memiliki jumlah pengurus yang beragam mulai dari 6 hingga 12 orang tergantung pada bisnis yang dijalankan, lokasi, umur panjang operasi, dan ukuran. Bumdes yang usahanya terkait dengan kekayaan alam desa, seperti perkebunan karet atau sawit, membutuhkan lebih

banyak karyawan dibandingkan dengan yang menjual sembako atau lainnya. Skor indikator ini sebesar 244 dan berada pada kategori Baik.

Analisis selanjutnya adalah anggaran. Anggaran berbeda dari modal. Itu adalah bagian dari modal. Tidak semua modal menjadi anggaran. Mengenai pernyataan ' Bumdes memiliki anggaran yang memadai atau ketersediaan anggaran yang memadai, 62,51% atau 40 responden berpendapat itu benar. Terbukti dengan masih adanya Bumdes yang menjalankan usahanya dengan cukup baik. Skor bagian ini tidak terlalu buruk. Angka itu adalah 227 dan berada di Baik juga.

Indikator keempat menunjukkan bahwa berada pada posisi Baik. Hal itu dilambangkan dengan skornya yaitu 247. Terdapat 44 responden yang mendukung pernyataan “tersedianya alat kerja yang layak” yang berarti Bumdes tempat mereka bekerja memiliki alat kerja yang layak. Responden memiliki pengetahuan tentang Bumdes mereka dan memiliki wewenang untuk mewakili Bumdes mereka. Oleh karena itu, pendapat mereka harus didengar. Dari 64 responden, 87% mendukung pernyataan yang diajukan.

Infrastruktur merupakan sesuatu yang sangat menentukan keberhasilan pekerjaan. Jika kondisinya tidak memadai, maka suasana kerja akan menjadi tidak nyaman. Itu bisa menyebabkan kegagalan kerja. Ketika responden diminta menjawab kalimat apakah tempat usaha Bumdes itu layak [ketersediaan tempat usaha yang layak], 94% mendukung – 40 responden setuju. 16 lainnya sangat setuju. Pada situasi ini, skor indikator kelima adalah 256. Masuk ke klasifikasi Baik.

Selain tempat usaha yang layak, alat kerja juga memegang peranan yang sangat penting untuk menentukan keberhasilan. Oleh

karena itu, manajemen Bumdes harus memberikan perhatian yang besar terhadap mereka. Ketika responden harus memilih satu dari lima pilihan jawaban - sangat tidak setuju [STS], tidak setuju [TS], ragu-ragu [R], setuju [S], sangat setuju [SS] - untuk pernyataan "ketersediaan alat yang memadai", dapat diketahui 2 responden sangat tidak setuju, 4 tidak setuju, 4 netral, 24 setuju, dan 30 lainnya sangat setuju. Terlihat bahwa sebagian besar responden – 54 orang atau 84,4% – mendukung pernyataan tersebut. Secara keseluruhan skor yang diperoleh adalah 269 dan termasuk dalam kategori Baik.

Pekerjaan itu menyenangkan dan bermakna, jika semuanya berjalan lancar. Pekerjaan yang bermakna mendorong pencapaian kinerja. Mengenai pekerjaan yang bermakna, Jessica Van Wingerden dan Joost Van der Stoep [2018] mengklaim pekerjaan yang bermakna memiliki hubungan positif dengan kinerja karyawan dalam beberapa cara yang saling terkait, melalui penggunaan kekuatan oleh karyawan, melalui keterlibatan kerja, dan melalui penggunaan kekuatan yang memengaruhi keterlibatan kerja. .

Pembahasan di atas memberikan informasi sebagai berikut, yaitu:

1. 54,69% [35 orang] responden tidak berkeberatan atas kalimat yang menyatakan “tersedianya modal yang memadai” bagi Bumdes. Kategori indikator cukup.
2. Indikator “ketersediaan SDM yang memadai” pada Bumdes berada pada level Baik. Hal ini didukung oleh 47 dari 64 responden atau 73,44 %.
3. Posisi parameter ketiga juga Baik karena skornya 227.

4. Terdapat 44 responden yang mendukung pernyataan “ketersediaan peralatan kerja yang layak”. Itu pada skor 247 dan Bagus.
5. Skor dari indikator kelima adalah 256. Masuk ke klasifikasi Baik.
6. 54 orang atau 84,4% mendukung pernyataan “ketersediaan alat yang memadai”. Secara keseluruhan skor 269 dan termasuk dalam kategori Baik.

Terlihat jelas bahwa dimensi kedua – kelancaran fungsi rutin – keberhasilan implementasi kebijakan telah Baik dengan skor 236. Merujuk pada teori yang dikemukakan oleh Randall. B. Ripley dan Grace A. Franklin, dapat disimpulkan bahwa - dalam hal kelancaran fungsi rutin - implementasi kebijakan, peraturan daerah, telah berhasil.

3.3. Dimensi Terwujudnya Kinerja dan Dampak yang Diinginkan

Akhirnya sampai pada dimensi terakhir keberhasilan implementasi peraturan daerah yaitu kinerja dan dampak yang diinginkan. Analisis dimulai dari kinerja yang diinginkan. Adapun yang dimaksud dengan kinerja disini, yakni hasil kerja nyata Bumdes, terutama untuk desa dimana Bumdes itu beroperasi, terbukanya kesempatan kerja bagi, serta penggunaan potensi desa.

Dimensi kinerja diikuti dengan dampak implementasi kebijakan, baik dampak warga desa maupun untuk Pemerintah desa tersebut. Data yang terkumpul adalah sebagai berikut.

Table 2.6.

Hasil Secara Kuantitatif Jawaban Responden terhadap Indikator-indikator Kinerja yang Diinginkan

No	Pernyataan	Pilihan Jawaban					SF	SH	Persentase
		STS (1)	TS (2)		R (3)	SS (5)			
1.	Peningkatan Pendapatan desa	2	5	13	22	22	249	320	100 %
2.	Terbukanya peluang usaha	0	0	0	10	54	310	320	100 %
3	Penggunaan potensi desa	10	5	5	9	35	246	320	100 %
	Total Skor	-	-	-	-	-	268	-	100 %

Sumber : Kuesioner, 2019.

Keterangan:

Skor Frekuensi [SF] = Pilihan jawab x Skor

Skor Hasil [SH] = Jumlah responden yang jawab x 5

Skor Rata-rata = (SF X 100%) : SH

STS > Sangat Tidak Setuju, TS > Tidak Setuju, R > Ragu-ragu,

S > Setuju, SS > Sangat Setuju

Menilai kinerja sangat penting untuk dilakukan. Untuk mengetahui kinerja yang diperoleh apakah sudah mencapai sebagaimana mestinya atau belum. De Nisi, Angelo S. dan Pritchard, Robert D.; 2015 mengatakan “merancang dan mengimplementasikan

sistem penilaian dan manajemen kinerja yang tujuannya adalah peningkatan kinerja adalah sesuatu yang sangat penting”.

Data pada tabel 2.7. berkaitan dengan skor 3 indikator dimensi kinerja yang diinginkan dari keberhasilan implementasi peraturan daerah di Kabupaten Musi Rawas.

Ketika diminta menjawab pernyataan “peningkatan pendapatan desa” yang berarti pendapatan desa meningkat karena adanya usaha Bumdes, secara kuantitatif terdapat 44 atau 69% responden yang mendukung pernyataan tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa usaha Bumdes telah berhasil dan memperoleh keuntungan dan sebagian keuntungan masuk ke rekening bank pemerintah desa. Hal itu membuat anggaran desa meningkat. Usaha Bumdes yang cenderung menguntungkan adalah yang berkaitan dengan kebutuhan sehari-hari, seperti pengadaan sembako, bahan baku konstruksi, persewaan alat, persewaan sarana pernikahan, dan lain-lain. Sementara itu, bisnis lain yang terkait dengan kekayaan alam desa - misalnya getah pohon karet, buah kelapa sawit, kopi bubuk, produk berbasis kakao, dan makanan berbasis ikan segar - juga menguntungkan, tetapi bergejolak. Keuntungannya fluktuatif karena keadaan bisnis ini tergantung pada musim, permintaan dan harga di pasar.

Indikator kedua dari dimensi kinerja yang diinginkan adalah “ketersediaan peluang bisnis”. Terhadap pernyataan ini, semua responden [100%] memberikan dukungannya. Mereka sepakat bahwa pendirian Bumdes membuka peluang usaha bagi warga desa yang bersangkutan. Penduduk desa bisa menjadi pemasok untuk Bumdes di desa mereka atau bekerja untuk Bumdes itu sendiri. Jadi, indikator ini termasuk dalam kategori Sangat Baik.

Indikator terakhir adalah pemanfaatan potensi desa. Jawaban responden bervariasi, seperti 10 responden sangat tidak setuju, 5 orang tidak setuju, 5 jawaban ragu-ragu, 9 menjawab setuju, dan 35 responden sangat setuju. Dari data tersebut terlihat bahwa secara keseluruhan sebagian besar responden yaitu 44 orang atau 69% mendukung pernyataan tersebut. Untuk ini, skornya adalah 246 dan termasuk dalam kategori Baik. Beberapa responden tampaknya menentang pernyataan yang diajukan karena saat ini ada begitu banyak jenis barang dagangan atau produk yang dapat dijual. Tidak hanya sebatas kekayaan alam yang dimiliki desa.

Pembahasan pada 3 indikator dimensi kinerja yang diinginkan di atas menunjukkan bahwa skor indikator pertama adalah 249, selanjutnya 310, dan parameter terakhir adalah 246. Rata-rata skor dimensi kinerja yang diinginkan telah tercapai. 269 dan berada di posisi Baik. Ini menyiratkan bahwa kinerja yang diinginkan telah tercapai. Jika implementasi suatu kebijakan menghasilkan kinerja yang baik, maka dapat disimpulkan – mengacu pada teori Randall. B. Ripley dan Grace A. Franklin – bahwa implementasinya berhasil.

Akhirnya, analisis sampai pada dampak yang diinginkan, sebagai bagian dari dimensi terakhir dari keberhasilan implementasi kebijakan. Dimensi ini terdiri dari 3 indikator juga. Mereka adalah kemudahan dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari penduduk desa, penduduk desa lebih sejahtera, dan citra pemerintah desa lebih positif. Data mengenai 3 indikator tersebut dapat dilihat pada tabel berikut.

Table 2.7.

Hasil Secara Kuantitatif Jawaban Responden terhadap Indikator-indikator Dampak yang Diinginkan

No	Pernyataan	Pilihan Jawaban					SF	SH	Per sent ase
		STS (1)	TS (2)	Ragu (3)	S (4)	SS (5)			
1.	Kemudahan pemenuhan kebutuhan harian warga desa	4	4	2	30	24	258	320	100 %
2.	Warga desa lebih sejahtera	7	8	5	40	4	218	320	100 %
3	Citra Pemdes lebih positif	5	5	5	30	19	245	320	100 %
	Total Skor	-	-	-	-	-	240		100 %

Sumber : Kuesioner, 2019.

Keterangan:

Skor Frekuensi [SF] = Pilihan jawab x Skor

Skor Hasil [SH] = Jumlah responden yang jawab x 5

Skor Rata-rata = (SF X 100%) : SH

STS > Sangat Tidak Setuju, TS > Tidak Setuju, R > Ragu-ragu,

S > Setuju, SS > Sangat Setuju

Skor yang termasuk dalam indikator pertama – kemudahan pemenuhan kebutuhan sehari-hari penduduk desa – pada tabel di atas adalah 258. Termasuk dalam kategori Baik. Alasan mendapat dukungan dari 54 orang tersebut karena sejak Bumdes ada di desanya, beberapa kebutuhan sehari-hari seperti sembako, bahan bangunan, telepon seluler dan pernak-pernik lebih mudah didapatkan. Tampaknya alasannya sangat sederhana, tetapi itu faktual. Penduduk di beberapa desa dulunya sulit mendapatkan sebagian kehidupan

sehari-hari karena beberapa desa sulit dijangkau atau bahkan tidak terjangkau melalui transportasi darat - seperti desa Sri Pengantin, Belani, dan Napallicin - karena kondisi jalan yang sangat buruk. Beberapa desa bahkan tidak memiliki akses transportasi darat. Mereka sangat terisolasi. Mereka mengambil transportasi sungai, sebagai gantinya.

Terkait indikator kedua, dari 64 responden, hanya 69% yang mendukung pernyataan “warga desa [menjadi] lebih sejahtera”. Ketika ditanya apakah benar masyarakat desa menjadi lebih sejahtera karena adanya Bumdes, mereka menjawab ya karena mereka dapat memenuhi sebagian kebutuhan sehari-hari dengan lebih mudah. Dalam persepsi mereka, cara memenuhi kebutuhan sehari-hari yang lebih mudah dipahami sebagai cara yang lebih sejahtera. Sederhana itu. Skor indikator ini hanya 218, maka dikategorikan Cukup.

Last but not least adalah indikator terakhir dari dimensi terakhir. Itu “citra pemerintah desa lebih positif”. Ada 49 dari 64 responden yang mengatakan demikian. Mereka menganggap keberadaan Bumdes di desa mereka berarti pemerintah desa benar-benar bekerja dan itu bagus. Skor yang diperoleh adalah 245 dan termasuk dalam kategori Baik. Desa yang memiliki Bumdes sudah mempunyai prestise baik bagi desa itu sendiri maupun bagi warganya. Sebuah Bumdes adalah simbol sebuah kemajuan – layaknya sebuah super market di kawasan kota. Berbeda dengan warung sembako tradisional, sebuah Bumdes memiliki bangunan yang lebih baik, terletak di tempat yang dianggap strategis, menjadi tempat berkumpulnya anak-anak muda, dan – tentu saja – menjual lebih banyak barang dagangan.

Skor ketiga indikator tersebut – dari dimensi dampak yang diinginkan – beragam. Skor-skor adalah 258, 218, dan 245. Rata-rata, skornya adalah 243. Itu termasuk dalam dimensi dampak yang diinginkan. Skor ini berkisar antara 220 – 271 – lihat tabel 2.2. – dan termasuk dalam kategori Baik.

3.4. Rekapitulasi Skor dan Kategori Per Indikator

Untuk memudahkan mengetahui seluruh indikator berdasarkan kategori, maka disajikan rekapitulasinya sebagai berikut.

Table 2.8.

Rekapitulasi Indikator Berdasarkan Category TidakBaik

No	Indikator	Skor
1.	Usaha Bumdes sesuai dengan potensi desa [Dimensi tingkat kepatuhan]	166

Table 2.9.

Rekapitulasi Indikator Berdasarkan Category Cukup

No	Indikator	Skor
1	Kades berperan sbg penasehat/ komisaris Bumdes [Dimensi tingkat kepatuhan]	197
2	Adanya modal usaha yang memadai [Dimensi kelancaran fungsi rutin]	175
3	Warga desa lebih sejahtera [Dimensi dampak yang diinginkan]	218

Table 2.10

Rekapitulasi Indikator Berdasarkan Kategori Baik

1	Ketersediaan anggaran yang cukup	227
2	Bumdes diawasi oleh Badan Perwakilan Desa	259
3	Ketersediaan SDM yang memadai	244
4	Ketersediaan perlengkapan kerja yang tepat	247
5	Adanya tempat usaha yang baik	256
6	Ketersediaan alat kerja yang memadai [Dimensi kelancaran fungsi rutin]	269
7	Adanya peningkatan penghasilan Desa	249
8	Adanya pemanfaatan potensi desa [Dimensi kinerja yang diinginkan]	246
9	Kemudahan pemenuhan kebutuhan sehari-hari warga desa	258
10	Warga desa lebih sejahtera [Dimensi dampak yang diinginkan]	218
11	Citra yang lebih positif thdp Pemdes [Dimensi dampak yang diinginkan]	245

Table 2.11

Rekapitulasi Indikator Berdasarkan Kategori Sangat Baik

No	Indikator	Skor
1	Pendirian Bumdes merujuk kpd Perdes	280
2	Pendirian Bumdes berdasarkan konsensus	299
3	Manajemen Bumdes terpisah dg manajemen Pemdes	294
4	Pengurus Bumdes terdiri dari penasehat dan pelaksana operasional	296

5	Pelaksana operasional terdiri dari manager & ketua unit usaha	310
6	Keuntungan harus dibagi dg pemilik saham	279
7	Manager Bumdes harus menyampaikan laporan kpd Pemdes	310
8	Bumdes diawasi oleh Badan Perwakilan Desa	259
9	GCG diterapkan oleh pengelola Bumdes [Dimensi tingkat kepatuhan]	287
10	Adanya kesempatan untuk berusaha	310

Teori - oleh Randall. B. Ripley dan Grace A. Franklin [1986] – yang dirujuk menyatakan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan diukur dengan 3 parameter atau dimensi, yaitu tingkat kepatuhan [terhadap isi kebijakan], kelancaran fungsi rutin [pembentukan dan pengelolaan usaha Bumdes], dan realisasi kinerja dan dampak yang diinginkan. Dari analisis data, dapat ditemukan informasi sebagai berikut:

1. Adanya kepatuhan pelaksana kebijakan terhadap isi kebijakan [Peraturan Bupati Kabupaten Musi Rawas]. Tingkat kepatuhan tergolong tinggi dengan skor 271 dan berada pada kategori baik.
2. Pembentukan dan kepengurusan Bumdes [kelancaran fungsi rutin] juga tinggi dengan skor 236 dan tergolong baik.
3. Kinerja pengelolaan Bumdes juga baik dengan skor 268. Dampak implementasi kebijakan positif/baik dengan skor 240.

Berdasarkan variabel, skornya adalah 254. Jika mengacu pada tabel 2.3. di atas, skor ini termasuk dalam kategori Baik.

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Implementasi

Secara teoritis, terutama menurut George C. Edwards III [1980], ada beberapa faktor penting yang mempengaruhi implementasi kebijakan. Faktor-faktor tersebut adalah: komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi.

Namun demikian, secara praktis realitis, terutama yang berkaitan dengan penelitian ini, faktor-faktor tersebut belum ditemukan sampai penelitian itu sendiri dilakukan.

Setelah mengumpulkan data, dapat diketahui faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas. Yaitu:

1. Kompetisi rendah. Para Bumdes hanya bersaing dengan warung-warung tradisional di desa-desa.
2. Persepsi. Menurut penduduk desa, khususnya anak-anak muda, membeli barang di Bumdes lebih menyenangkan dan bergengsi daripada menghabiskan uang di warung tradisional.
3. Bagi beberapa Bumdes, keterisolasian desa mempengaruhi keberhasilan karena pembeli tidak punya tempat lagi untuk dituju.

3.5. Kesimpulan

Dari analisis di atas dapat disimpulkan bahwa implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 10 Tahun 2013 tentang Pembentukan dan Tata Cara Pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) berhasil dengan baik.

Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Implementasi Perda:

1. Rendahnya kompetisi, namun justru menurunkan motivasi untuk berinovasi
2. Persepsi tentang positifnya kedudukan BUMDes
3. Tiadanya pesaing karena keterisolasian wilayah bagi beberapa BUMDes.

Daftar Pustaka

- Alfatih, Andy. ; 2010; Implementasi Program dan Pemberdayaan Masyarakat or in english, Program Implementation and Community Development. Bandung: Unpad Press.
- Alfatih, Andy; 2012; The Failure of Policy Implementation in Indonesia and The Breakthrough. *International seminar and conference on innovative government*. Malang: Universitas Brawijaya.
- Alfatih, Andy; 2019; Simple guidelines for carrying out quantitative descriptive research; Sriwijaya University Press; Palembang.
- DeNisi, Angelo S. and Pritchard, Robert D.; 2015; performance appraisal, performancemanagement and improving individual performance: a motivational framework; *Management and Organization Review*; Volume 2, Issue 2.
- Dye, Thomas R.; 2017; Understanding Public Policy, 15th Edition; Florida State University, Florida
- Edwards III, George C.; 1980; Implementing Public Policy; Congressional Quarterly Presspublisher, Washington D.C.
- Kokemuller, Neil; Advantages and Disadvantages of Product Differentiation, Azcentral, part of the USA today network, April 2018

Riant Nugroho, 2016, Kebijakan Publik di Indonesia, Penerbit :
Pustaka Pelajar, Jakarta

Riduwan, 2010. Method and Technique of Writing Thesis.
Penerbit Alfabeta, Bandung.

Sujianto, Agus Eko; 2007; Statistics Application with SPSS for
Beginner; Prestasi Pustaka Publisher, Jakarta

Sugiyono. 2010. Statistics for Research. Penerbit Alfabeta,
Bandung.

Trainor, Gary; 2012; Importance Of Compliance In Business;
How to Learn.Com.; August, 2012

Umar, Husein; 2004. Research Method in Administration; PT.
Gramedia Pustaka Umum, Jakarta.

Wingerden, Jessica Van and Stoep, Joost Van der; 2018; The
motivational potential of meaningful work: Relationships
with strengths use, work engagement, and
performance, Plos One an open access journal, June 2018.

Peraturan

Peraturan Daerah [Perda] Kabupaten Musi Rawas nomor 10
tahun 2013 tentang pendirian dan prosedur pengelolaan
Badan Usaha Milik Desa {Bumdes}.

BAB IV
Hasil Kajian Pemberdayaan Badan Usaha Milik Desa
[BUMDes]
Judul Asli Penelitian
Dampak Implementasi Kebijakan Pembentukan dan
Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa [BUMDes]
[Studi terhadap Beberapa BUMDes di Kabupaten Musi
Rawas, Provinsi Sumatera Selatan]

Penelitian ini yang berjudul Dampak Implementasi Kebijakan Pendirian Badan Usaha Milik Desa di Kabupaten Musi Rawas, Provinsi Sumatera Selatan, dilaksanakan pada tahun 2020, adalah kelanjutan dari penelitian sebelumnya, tahun 2019, yang berjudul Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas nomor 10 tahun 2013 tentang pendirian dan prosedur pengelolaan Badan Usaha Milik Desa {Bumdes}.

4.1. Dampak Implementasi Kebijakan dari Berbagai Aspek

Dalam hubungannya dengan dampak kebijakan, hal ini juga didiskusikan dalam teori Marilee S. Grindle [1980]. Menurut teori tersebut, dampak dari implementasi suatu kebijakan publik dapat mengenai masyarakat, individu, dan kelompok. Disamping itu, dampak kebijakan dapat menimbulkan perubahan serta penerimaan oleh masyarakat. Namun, dalam penelitiannya, teori tersebut tidak secara khusus menjadi referensi karena cakupannya kurang komprehensif. Kajian ini melihat dampak implementasi suatu

kebijakan dari berbagai aspek kehidupan masyarakat yang menjadi khalayak sasaran [target group] suatu kebijakan publik. Dalam hal ini yakni Badan Usaha Milik Desa [BUMDes]. Aspek-aspek tersebut, yaitu:

ASPEK EKONOMI: PENINGKATAN MODAL USAHA

1	Bantuan Modal
2	Bantuan Pelatihan
3	Bantuan pendampingan
4	Bantuan Usaha pihak lain
5	Pinjaman Usaha untuk pengembangan

EKONOMI: KEMAJUAN USAHA

6	Perbaiki tempat usaha
7	Produk usaha meningkat
8	Teknologi, peralatan, perlengkapan dan usaha
9	Pemasaran Produk makin luas
10	Permintaan Pasar luas

ASPEK EKONOMI: KEUNTUNGAN USAHA

11	Usaha menguntungkan
12	Keuntungan usaha meningkat

ASPEK SOSIAL: KETERKAITAN SOSIAL DENGAN BUMDES

13	Memiliki jabatan penting
14	Masyarakat respek pada jabatan
15	Peningkatan usaha sejak memimpin

ASPEK SOSIAL: KEIKUTAN ASOSIASI

16	Bergabung dengan asosiasi
17	Menjadi jabatan/pengurus di asosiasi

18 | Asosiasi tingkat kabupaten

ASPEK SOSIAL: TANGGAPAN MASYARAKAT TERHADAP BUMDES

19 | Masyarakat mendukung BUMDes

20 | Masyarakat tidak peduli sama BUMDes

21 | Masyarakat menolak BUMDes

ASPEK LINGKUNGAN: KETERSEDIAAN BAHAN BAKU USAHA

22 | Bahan baku dari desa

23 | Bahan baku alam

24 | Kemudahan mendapatkan produk

ASPEK LINGKUNGAN: PERLAKUAN SISA BAHAN BAKU PRODUKSI

25 | Menisahkan bahan baku (limbah)

26 | Limbah bahan baku di daur ulang

27 | Limbah dibuang sembarang

ASPEK POLITIK: KETERLIBATAN UNSUR PARPOL

28 | Unsur parpol pendirian BUMDes

29 | Bentuk keterlibatan parpol

30 | Unsur parpol intens

ASPEK POLITIK: AFILIASI/MENJALIN HUBUNGAN DENGAN PARPOL

31 | Hubungan khusus dengan parpol

32 | Pengurus dari parpol

33 | BUMDes mewakili kepentingan parpol

34 | Pengarahan yang mengarah ke parpol

Dengan demikian, pernyataan-pernyataan yang diajukan kepada para responden adalah hal-hal yang berkenaan dengan berbagai aspek tersebut di atas.

4.2. Dampak Terhadap Aspek Ekonomi: Peningkatan Modal Usaha

Data yang sudah dikumpulkan akan disajikan per indikator untuk masing-masing aspek. Penyajian data aspek ekonomi untuk indikator pertama, yaitu bantuan modal dari Pemda adalah seperti di bawah ini.

Tabel 3.1.

Adanya Bantuan Modal dari Pemda

No	Pilihan Jawaban	Frekuensi	Persentase	Skor Frekuensi
1	Sangat setuju [5]	6	9%	30
2	Setuju [4]	5	8%	20
3	Ragu-ragu [3]	5	8%	15
4	Tidak setuju [2]	30	47%	60
5	Sangat tidak setuju [1]	18	28%	18
	Total Skor	64	100%	143

Sumber : Kuesioner, 2020.

Data dari tabel 3.1. di atas menunjukkan bahwa sebagian besar responden, yaitu 48 orang atau 75% menyatakan tidak ada bantuan modal usaha – jawaban tidak setuju dan sangat tidak setuju - dari Pemda. Ini dapat dimaklumi sebab pada masa pandemi covid 19

seperti sekarang ini – penelitian dilakukan pada tahun 2020 – sebagian besar perhatian dan sumber daya, termasuk anggaran Pemda – bahkan di hampir setiap daerah di seluruh Indonesia – dialokasikan untuk mengatasi penyebaran dan penyembuhan pasien virus covid 19. Apalagi pada tahun 2020 itu, penyebaran dan penderita penyakit ini berada pada curve yang sangat tinggi. Jika merujuk pada tabel 2.3. di bab 2, yaitu tabel klasifikasi kualitas indikator berdasarkan pada rentang skornya, maka total **skor indikator** “adanya bantuan modal dari Pemda” di tabel 3.1. **berada pada angka 143**. Ini artinya indikator tersebut berada pada **kategori kualitas yang tidak baik**. Jadi sudah ada 1 dari 5 indikator aspek ekonomi yang menunjukkan negatif atau berada pada kategori tidak baik.

Selanjutnya akan dianalisis indikator kedua dari aspek ekonomi, yakni adanya bantuan pelatihan dari Pemda. Datanya ada di tabel 3.2. di bawah ini.

Tabel 3.2.

Adanya Bantuan Pelatihan dari Pemda

No	Pilihan Jawaban	Frekuensi	Persentase	Skor Frekuensi
1	Sangat setuju [5]	30	47%	150
2	Setuju [4]	19	29%	76
3	Ragu-ragu [3]	5	8%	15
4	Tidak setuju [2]	5	8%	10
5	Sangat tidak setuju [1]	5	8%	5
	Total Skor	64	100%	256

Sumber : Kuesioner, 2020.

Data di atas menunjukkan adanya bantuan pelatihan dari Pemda untuk Bumdes di Kabupaten Musi Rawas. Ini terindikasi dari mayoritas responden menyatakan sangat setuju – 30 orang atau 47% dan setuju – 19 responden atau 29% - terhadap pernyataan “ada bantuan pelatihan dari Pemda”. Jawaban sangat setuju dan setuju maknanya bantuan pelatihan memang ada. Hanya saja, peneliti yakin bahwa pelatihan yang diberikan Pemda kepada Bumdes tidak diadakan pada tahun 2020 – walaupun penelitian diadakan pada tahun 2020 tersebut. Ini dikarenakan di tahun 2020 tersebut pandemi covid 19 sedang marak-maraknya terjadi. **Skor indikator** ini adalah sebesar **256** dan berada pada rentang 220-271 yang berarti berada dalam kategori baik. Indikator ini **bersifat positif** dari dampak kebijakan, khususnya dampak yang berkenaan dengan aspek ekonomi. Adapun pelatihan yang diberikan Pemda adalah pengemasan produk [product packaging] dan pengelolaan usaha.

Indikator ketiga yang akan dikaji adalah indikator “adanya pendampingan dari Pemda untuk Bumdes”

Tabel 3.3.

Adanya Bantuan Pendampingan dari Pemda

No	Pilihan Jawaban	Frekuensi	Persentase	Skor Frekuensi
1	Sangat setuju [5]	43	67%	215
2	Setuju [4]	5	8%	20
3	Ragu-ragu [3]	6	9%	18
4	Tidak setuju [2]	5	8%	10
5	Sangat tidak setuju [1]	5	8%	5
	Total Skor	64	100%	268

Sumber : Kuesioner, 2020.

Bumdes di Kabupaten Musi Rawas, ternyata tidak hanya mendapatkan bantuan pelatihan, mereka juga mendapatkan pendampingan dari Pemda. Pendampingan ini, khususnya berkenaan dengan masalah hukum dan urusan dengan perbankan. Dari 64 responden, 48 orang atau 75% responden yang menyatakan demikian, melalui pilihan jawaban mereka, yaitu sangat setuju dan setuju. Pendampingan memang diperlukan oleh para pengurus Bumdes, terutama dalam hal hukum dan perbankan. Ini dikarenakan mereka tidak mempunyai pengetahuan dan pengalaman tentang hal tersebut. Adapun skor secara keseluruhan untuk indikator ini, yaitu sebesar **268. Ini termasuk kategori Baik.**

Seterusnya, indikator aspek ekonomi yang akan dibahas, yakni bantuan dari pihak lainnya.

Tabel 3.4.

Adanya Bantuan Usaha dari Pihak Lain

No	Pilihan Jawaban	Frekuensi	Persentase	Skor Frekuensi
1	Sangat setuju [5]	5	8%	20
2	Setuju [4]	18	28%	72
3	Ragu-ragu [3]	5	8%	15
4	Tidak setuju [2]	21	33%	42
5	Sangat tidak setuju [1]	15	23%	15
	Total Skor	64	100%	164

Sumber : Kuesioner, 2020.

Selain dari pihak Pemda, ternyata sebagian besar Bumdes di Kabupaten Musi Rawas secara formal tidak mendapatkan bantuan dari pihak lainnya, terutama pihak swasta. Ini terbukti dari banyaknya responden yang menjawab demikian, yakni sebanyak 36 orang atau 56

% dari seluruh responden. Memang ada juga responden yang menjawab mereka mendapat bantuan dari pihak lain, tetapi tidak begitu banyak, yaitu hanya 23 responden atau 26%. Mereka mendapat bantuan dari pihak lain, baik swasta atau perorangan, dikarenakan adanya hubungan kekerabatan yang baik antara pengelola Bumdes dengan pihak lainnya tersebut. Jadi ini bersifat personal. Adapun bantuan tersebut bersifat sekali-sekali dan berupa pemberian uang untuk membeli makanan atau minuman bagi pengelola dan karyawan Bumdes. Berdasarkan total skor yang diperoleh, indikator “adanya bantuan dari pihak lain ini” **tergolong tidaka baik** karena hanya mendapat **total skor sebesar 164**.

Terakhir, indikator yang akan dianalisis adalah “pinjaman dari pihak lain untuk pengembangan usaha.

Tabel 3.5.

Adanya Pinjaman Usaha dari Pihak Lain untuk Pengembangan

No	Pilihan Jawaban	Frekuensi	Persentase	Skor Frekuensi
1	Sangat setuju [5]	5	8%	25
2	Setuju [4]	5	8%	20
3	Ragu-ragu [3]	9	27%	15
4	Tidak setuju [2]	24	48%	60
5	Sangat tidak setuju [1]	21	21%	18
	Total Skor	64	100%	112

Sumber : Kuesioner, 2020.

Mengenai ada-tidaknya pinjaman dari pihak lain untuk pengembangan usaha, sebagian sebesar, yaitu 69% atau 45 responden menyatakan tidak ada. Di masa yang sulit karena pandemi covid 19

sulit sekali untuk mendapatkan pinjaman. Walaupun ada pihak yang bersedia memberikan pinjaman, seringkali justru para pengusaha belum siap untuk menerimanya sebab dalam kondisi seperti ini bisnis sulit berkembang. Bahkan banyak yang collaps. Total skor indikator ini sangat rendah, yaitu **112** dan termasuk dalam kelompok **sangat tidak baik**. Jadi dampak yang negatif.

Agar mudah untuk mengidentifikasi kategori masing-masing aspek, maka akan dibuatkan rekapitulasi aspek tersebut berdasarkan nilai rata-rata dari rata-rata jumlah total skor. Lihat tabel 3.6. untuk aspek yang pertama, yaitu aspek ekonomi: peningkatan modal usaha.

Tabel 3.6.

Rekapitulasi Skor dan Kategori Aspek Ekonomi: Peningkatan Modal Usaha Per Indikator

No	Indikator	Total Skor	Kategori
1	Bantuan Modal Usaha dari Pemda	143	Tidak baik
2	Bantuan Pelatihan dari Pemda	256	Baik
3	Bantuan Pendampingan dari Pemda	268	Baik
4	Bantuan usaha dari pihak lain	164	Tidak baik
5	Pinjaman usaha dari pihak lain	112	Sangat tidak baik
	Skor aspek rata-rata Aspek Ekonomi: Peningkatan Modal Usaha	188	CUKUP

Sumber: Total skor masing-masing indikator

Pada tabel 3.6. di atas, terindikasi bahwa nilai rata-rata aspek ekonomi: peningkatan modal usaha yaitu **188 dan dikategorikan cukup.**

4.3. Dampak Aspek Ekonomi: Kemajuan Usaha

Analisis selanjutnya adalah analisis per indikator untuk aspek ekonomi: Kemajuan Usaha. Ini akan dimulai dari indikator pertama dari aspek ekonomi: Kemajuan Usaha, yaitu perbaikan tempat usaha.

Tabel 3.7.
Adanya Perbaikan Tempat Usaha

No	Pilihan Jawaban	Frekuensi	Persentase	Skor Frekuensi
1	Sangat setuju [5]	35	55%	175
2	Setuju [4]	13	20%	52
3	Ragu-ragu [3]	5	8%	15
4	Tidak setuju [2]	6	9%	12
5	Sangat tidak setuju [1]	5	8%	5
	Total Skor	64	100%	259

Sumber : Kuesioner, 2020.

Berdasarkan pengamatan lapangan, secara rata-rata, bangunan yang digunakan Bumdes untuk membuka usaha cukup bagus. Sebagian besar merupakan bangunan permanen, walau ada yang semi permanen. Ada bangunan yang menempel di sebelah rumah pengurus Bumdes, namun banyak juga yang terpisah dan berdiri sendiri. Tempat usaha Bumdes ini secara umum tidak terlalu luas. Lebih kurang seluar 5 meter x 3 atau 4 meter. Hal ini juga ditunjang data,

dimana lebih banyak responden – 48 orang atau 75% - menyatakan bahwa tempat usaha Bumdes mereka sudah diperbaiki dari bangunan usaha Bumdes semula. Ini artinya secara fisik bangunan tempat usaha Bumdes sudah mengalami kemajuan, walaupun untuk beberapa bangunan Bumdes tidak terlalu banyak kemajuan. Total skor untuk indikator “adanya perbaikan tempat usaha Bumdes” ini adalah **259 dan ini termasuk kategori baik.**

Indikasi kemajuan usaha Bumdes diukur juga dari parameter meningkatnya jumlah produksi. Datanya tersedia pada tabel 3.8. berikut ini.

Tabel 3.8.
Jumlah Produksi Usaha Meningkat

No	Pilihan Jawaban	Frekuensi	Persentase	Skor Frekuensi
1	Sangat setuju [5]	27	42%	135
2	Setuju [4]	17	26%	68
3	Ragu-ragu [3]	5	8%	15
4	Tidak setuju [2]	10	16%	22
5	Sangat tidak setuju [1]	5	8%	5
	Total Skor	64	100%	245

Sumber : Kuesioner, 2020.

Dari 64 responden, 44 diantaranya atau 68% mengakui bahwa produksi usaha mereka secara umum memang meningkat. Namun, selama 1 tahun terakhir ini, produksi cenderung menurun karena adanya wabah penyakit corona [Covid 19]. Adapun produksi Bumdes tersebut, diantaranya kopi bubuk, pakan ikan, makanan, beli-jual hasil kebun, sembako, dan air isi ulang.

Parameter lain dari kemajuan usaha Bumdes, yakni adanya perbaikan teknologi, peralatan, dan usaha.

Tabel 3.9.

Perbaikan Teknologi, Peralatan, Perlengkapan Usaha

No	Pilihan Jawaban	Frekuensi	Persentase	Skor Frekuensi
1	Sangat setuju [5]	21	33%	105
2	Setuju [4]	5	8%	20
3	Ragu-ragu [3]	6	9%	18
4	Tidak setuju [2]	23	36%	46
5	Sangat tidak setuju [1]	9	14%	9
	Total Skor	64	100%	198

Sumber : Kuesioner, 2020.

Cuma 26 responden atau 41% yang menyatakan mereka mengalami perbaikan teknologi, peralatan, dan perlengkapan usaha. Sebagian besar, 32 responden atau 50% mengakui bahwa ha-hal yang berkenaan dengan kemajuan ini tidak terjadi. Secara umum, teknologi, peralatan, maupun perlengkapan yang mereka gunakan untuk berusaha adalah yang lazim dan sederhana saja. Misalnya, kalkulator untuk berhitung, timbangan yang umum saja, lemari dan tempat duduk biasa saja, hand phone untuk alat komunikasi, dan motor – ada juga menggunakan perahu - untuk transportasi. Peningkatan dari indikator ini mempunyai skor **198 dan diklasifikasikan Cukup.**

Selanjutnya, analisis pemasaran produk yang semakin luas. Secara kuantitatif, datanya dapat dilihat dalam tabel 3.10 di bawah ini.

Tabel 3.10.

Semakin Luasnya Pemasaran Produk

No	Pilihan Jawaban	Frekuensi	Persentase	Skor Frekuensi
1	Sangat setuju [5]	20	31%	100
2	Setuju [4]	6	9%	24
3	Ragu-ragu [3]	7	11%	21
4	Tidak setuju [2]	20	31%	40
5	Sangat tidak setuju [1]	12	19%	12
	Total Skor	64	100%	197

Sumber : Kuesioner, 2020.

Ternyata cukup sulit bagi Bumdes di Kabupaten Musi Rawas, Provinsi Sumatera Selatan untuk memperluas pemasaran produk atau barang dagangan usaha mereka. Hanya sebagian kecil, 26 responden atau 40% yang mengalami perluasan pemasaran produk atau barang dagangan mereka. Itupun hanya bersifat kekerabatan saja bisa terjadinya. Dalam arti kata, produk atau barang dagangan sebagian Bumdes dapat dipasarkan ke tempat-tempat di luar desa [dusun] mereka karena penduduk desa tersebut tinggal di wilayah lain [huma atau perladangan yang di luar desa]. Tetapi sebenarnya, orang-orang tersebut warga desa suatu desa tertentu membeli produk atau barang dagangan suatu Bumdes di desanya, lalu barang tersebut dibawa ke wilayah lain [huma atau perladangan yang di luar desa] dimana mereka sehari-hari menetap. Indikator ini berada pada kategori **cukup, dengan skor 197**. Cukup disini maksudnya cukup ada

kemajuan [meluasnya] pemasaran produk atau barang dagangan Bumdes.

Untuk mengetahui posisi aspek ekonomi: Kemajuan Usaha, maka berikut ini dibuatkan rekapitulasi skor dan kategori masing-masing indikator aspek ini.

Tabel 3.11
Rekapitulasi Skor dan Kategori Aspek Ekonomi: Kemajuan Usaha Per Indikator

No	Indikator	Total Skor	Kategori
1	Adanya Perbaikan Tempat Usaha	259	Baik
2	Jumlah Produksi Usaha Meningkatkan	245	Baik
3	Perbaikan Teknologi, Peralatan, Perlengkapan Usaha	198	Cukup
4	Semakin Luasnya Pemasaran Produk	197	Cukup
	Skor aspek rata-rataAspek Ekonomi: Kemajuan Usaha	225	BAIK

Sumber: Total skor masing-masing indikator

Terlihat pada table 3.11 di atas bahwa skor rata-rata aspek ekonomi: kemajuan usaha adalah **225 dan termasuk dalam kategori baik.**

4.4.Dampak Aspek Ekonomi: Keuntungan Usaha

Aspek ekonomi selanjutnya yaitu dalam wujud keuntungan usaha terdiri dari 2 indikator, yakni usaha menguntungkan serta keuntungan usaha meningkat.

Tabel 3.12.

Usaha Bumdes Memberikan Keuntungan

No	Pilihan Jawaban	Frekuensi	Persentase	Skor Frekuensi
1	Sangat setuju [5]	44	68%	220
2	Setuju [4]	5	8%	20
3	Ragu-ragu [3]	5	8%	15
4	Tidak setuju [2]	5	8%	10
5	Sangat tidak setuju [1]	5	8%	5
	Total Skor	64	100%	270

Sumber : Kuesioner, 2020.

Tabel 3.12 menunjukkan bahwa 76% atau 45 responden menjawab sangat setuju dan setuju – berarti memang benar - bahwa usaha yang Bumdes mereka jalankan mendatangkan keuntungan. Dalam bisnis, tujuan utamanya adalah mendapatkan keuntungan. Agar tujuan ini tercapai, maka para pengurus Bumdes bekerja keras untuk mewujudkannya. Jadi wajar saja kalau usaha Bumdes tersebut memberikan keuntunga. Total skor indikator ini yakni **270 serta berada dalam kategori baik.**

Indikator kedua dari Aspek ekonomi dalam wujud keuntungan usaha adalah adanya peningkatan keuntungan usaha Bumdes.

Tabel 3.13.

Keuntungan Bumdes Meningkat

No	Pilihan Jawaban	Frekuensi	Persentase	Skor Frekuensi
1	Sangat setuju [5]	29	45%	145
2	Setuju [4]	20	31%	80
3	Ragu-ragu [3]	5	8%	15
4	Tidak setuju [2]	5	8%	10
5	Sangat tidak setuju [1]	5	8%	5
	Total Skor	64	100%	255

Sumber : Kuesioner, 2020.

Usaha yang dijalankan Bumdes tidak saja memberikan keuntungan, bahkan keuntungan yang diperoleh terlihat meningkat. Tabel 3.13 di atas memberikan informasi dari 64 responden, 49 responden atau 76 % menyatakan keuntungan mereka meningkat. Ini menunjukkan atmosphere bisnis di Kabupaten Musi Rawas cukup kondusif. Indikator ini memiliki skor sebesar **255 dan dikategorikan baik.**

Di bawah ini disajikan rekapitulasi aspek ekonomi dalam wujud keuntungan usaha berdasarkan skor rata-rata masing-masing indikatornya.

Tabel 3.14

Rekapitulasi Skor dan Kategori Aspek Ekonomi: Keuntungan Usaha Per Indikator

No	Indikator	Total Skor	Kategori
1	Usaha Bumdes Memberikan Keuntungan	270	Baik
2	Keuntungan Bumdes Meningkat	255	Baik
	Skor aspek rata-rata Aspek Ekonomi: Keuntungan Usaha	262	BAIK

Sumber: Total skor masing-masing indikator

Sehubungan dengan keuntungan usaha Bumdes, terlihat aspek ini secara rata-rata mempunyai **skor 262 dikategorikan baik**.

4.5. Dampak Terhadap Aspek sosial: Keterkaitan sosial dengan BUMDes

Analisis aspek ekonomi selesai. Selanjutnya akan dianalisis aspek sosial. Aspek sosial dalam kaitannya dengan status sosial memiliki 3 indikator, yakni pengurus Bumdes [yang kebenaranekaligusmenjadi responden penelitianini] memiliki jabatan yang penting di Bumdesnya , masyarakat respek pada jabatan pengurus Bumdes tersebut, serta adanya peningkatan usaha Bumdes sejak responden menjadi pengurus/pemimpin Bumdes. Masing-masing indikator ini akan dibahas satu per satu seperti berikut ini.

Tabel 3.15.
Pengurus Bumdes yang Menjadi Responden ini Mempunyai
Jabatan yang Penting

No	Pilihan Jawaban	Frekuensi	Persentase	Skor Frekuensi
1	Sangat setuju [5]	43	67%	215
2	Setuju [4]	6	9%	24
3	Ragu-ragu [3]	5	8%	15
4	Tidak setuju [2]	5	8%	10
5	Sangat tidak setuju [1]	5	8%	5
	Total Skor	64	100%	269

Sumber : Kuesioner, 2020.

Dari 64 responden – sebagian besar ketua Bumdes. Tetapi ada juga yang menjabat sebagai bendahara dan pengurus biasa - yang ditanya, sebanyak 49 diantaranya menjawab bahwa memang mereka mempunyai jabatan penting di Bumdes. Maksud mereka jabatan yang penting adalah jabatan yang menentukan berhasil-tidaknya usaha yang dijalankan oleh Bumdes. Oleh karena itu, mereka berusaha untuk melaksanakan tugas mereka sebaik mungkin. Total skor indikator ini yaitu **269 dan dikategorikan baik.**

Indikator kedua dari aspek sosial ini adalah adanya respek masyarakat terhadap jabatan di Bumdes.

Tabel 3.16.

Adanya Respek Masyarakat terhadap Jabatan di Bumdes

No	Pilihan Jawaban	Frekuensi	Persentase	Skor Frekuensi
1	Sangat setuju [5]	41	64%	205
2	Setuju [4]	6	9%	24
3	Ragu-ragu [3]	7	11%	21
4	Tidak setuju [2]	5	8%	10
5	Sangat tidak setuju [1]	5	8%	5
	Total Skor	64	100%	265

Sumber : Kuesioner, 2020.

Menurut persepsi pengurus Bumdes yang mempunyai jabatan di Bumdes dan menjadi responden penelitian ini, masyarakat secara umum respek [menghormati] terhadap para pengurus Bumdes, apapun jabatan mereka. Paling tidak, sejumlah 47 responden atau 73 % yang beranggapan demikian. Masyarakat respek kepada mereka sebab merekalah yang membuat Bumdes dinamis dan bahkan maju. Dengan keberadaan Bumdes, apalagi keadaannya berkembang, maka masyarakat mendapat banyak manfaat. Misalnya, dapat memenuhi kebutuhan masyarakat, ada tempat untuk mensuplai barang, dan seringkali suasana di sekitar Bumdes rami karena banyak masyarakat yang berkumpul disana. Karena total skor indikator ini cukup tinggi, yaitu **265, maka ia masuk kategori baik.**

Sejak responden menjadi pengurus di Bumdes, maka usaha Bumdes tersebut maju atau meningkat.

Tabel 3. 17.

Usaha Bumdes Maju selama Masa Jabatan

No	Pilihan Jawaban	Frekuensi	Persentase	Skor Frekuensi
1	Sangat setuju [5]	44	68%	220
2	Setuju [4]	5	8%	20
3	Ragu-ragu [3]	5	8%	15
4	Tidak setuju [2]	5	8%	10
5	Sangat tidak setuju [1]	5	8%	5
	Total Skor	64	100%	270

Sumber : Kuesioner, 2020.

Selama responden menjadi pengurus [mendapat jabatan di] Bumdes, usaha ini dirasakan mengalami kemajuan. Sebanyak 49 responden yang berpendapat demikian. Kategori indikator ini **baik** sebab skornya 270.

Tabel 3.18.

Rekapitulasi Skor Dan Kategori Aspek Sosial dalam Kaitannya dengan Status Sosial Per Indikator

No	Indikator	Total Skor	Kategori
1	Pengurus Bumdes yang Menjadi Responden ini Mempunyai Jabatan yang Penting	269	Baik
2	Adanya Respek Masyarakat terhadap Jabatan di Bumdes	265	Baik
3	Usaha Bumdes Maju selama Masa Jabatan	270	Baik
	Skor aspek rata-rata Aspek Sosial dalam Kaitannya dengan Status Sosial	225	BAIK

Sumber: Total skor masing-masing indikator

Ditinjau dari aspek sosial dalam kaitannya dengan status sosial pengurus yang mempunyai jabatan di Bumdes, terlihat dari tabel di atas bahwa skor rata-rata daripada aspek ini adalah 225 dan itu berada pada kategori baik.

4.6. Dampak Terhadap Aspek Sosial: Keikut-asosiasi

Aspek sosial selanjutnya yang akan dikaji yaitu keikut-sertaan Bumdes pada asosiasi atau perkumpulan Bumdes atau usaha yang sejenis. Aspek sosial dari keikut-sertaan pada asosiasi ini terdiri dari 3 indikator, yaitu bergabung dengan asosiasi, mempunyai jabatan/pengurus di asosiasi, tingkatan asosiasi yang diikuti. Secara rinci per indikator, datanya ditampilkan dalam beberapa tabel di bawah ini.

Tabel 3.19.

Keikut-sertaan Bumdes pada Asosiasi

No	Pilihan Jawaban	Frekuensi	Persentase	Skor Frekuensi
1	Sangat setuju [5]	38	59%	190
2	Setuju [4]	5	8%	20
3	Ragu-ragu [3]	5	8%	15
4	Tidak setuju [2]	6	9%	12
5	Sangat tidak setuju [1]	10	16%	10
	Total Skor	64	100%	247

Sumber : Kuesioner, 2020.

Asosiasi merupakan salah satu bentuk organisasi dimana para pelaku usaha dapat memperjuangkan kepentingan mereka. Dalam

konteks ini, organisasi tersebut adalah asosiasi badan usaha milik desa Kabupaten Musi Rawas. Ada 43 atau 67% bumdes yang tergabung dalam asosiasi. Adapun bentuk kepentingan mereka yang mereka urus adalah mengamankan pasokan bahan baku, seperti kopi bubuk, buah coklat, serta mamatok harga jual produk yang merekausahakan. Total skor indikator ini 247 dan itu termasuk kategori baik.

Indikator lainnya dari aspek sosial yaitu memiliki jabatan atau menjadi pengurus asosiasi.

Tabel 3.20.

Memiliki Jabatan/Menjadi Pengurus Asosiasi

No	Pilihan Jawaban	Frekuensi	Persentase	Skor Frekuensi
1	Sangat setuju [5]	4	6%	20
2	Setuju [4]	5	8%	20
3	Ragu-ragu [3]	5	8%	15
4	Tidak setuju [2]	29	45%	58
5	Sangat tidak setuju [1]	21	33%	21
	Total Skor	64	100%	134

Sumber : Kuesioner, 2020.

Nampaknya, para pengurus Bumdes di Kabupaten Musi Rawas banyak sekali yang tidak tertarik untuk menjadi pengurus asosiasi. Alasan mereka secara pasti tidak diketahui, namun kemungkinan besar dikarenakan kesibukan pengurus Bumdes di desa masing-masing serta keberadaan sekretariat asosiasi ke ibu kota Kabupaten

yang jauh dari desa mereka. Hanya 9 pengurus bumdes yang menjadi pengurus asosiasi.

Tabel 3.21.

Keikutan Asosiasi Tingkat Kabupaten

No	Pilihan Jawaban	Frekuensi	Persentase	Skor Frekuensi
1	Sangat setuju [5]	39	61 %	195
2	Setuju [4]	5	8 %	20
3	Ragu-ragu [3]	5	8%	15
4	Tidak setuju [2]	7	11 %	14
5	Sangat tidak setuju [1]	8	12 %	8
	Total Skor	64	100%	252

Sumber : Kuesioner, 2020.

Sama halnya dengan keikut-sertaan bumdes pada asosiasi. Keikut-sertaan bumdes pada asosiasi tingkat Kabupaten cukup banyak, yaitu ada 44 orang. Memang mereka ikut asosiasi tersebut, namun nampaknya tidak aktif. Hanya tercatat saja sebagai anggota.

Tabel 3.22.

Rekapitulasi Skor Dan Kategori Aspek Sosial dalam Kaitannya dengan Keikut-sertaan pada AsosiasiPer Indikator

No	Indikator	Total Skor	Kategori
1	Keikut-sertaan Bumdes pada Asosiasi	247	Baik
2	Memiliki Jabatan/Menjadi Pengurus Asosiasi	134	Tidak Baik
3	Keikutan Asosiasi Tingkat	252	Baik

	Kabupaten		
	Skor rata-rata	211	CUKUP

Sumber: Total skor masing-masing indikator

Aspek sosial, khususnya yang berkenaan dengan keikutsertaan Bumdes pada asosiasi bumdes dikategorikan cukup saja karena skor rata-ratanya hanya 211. Namun demikian, aspek ini tetap saja berperan dalam menentukan dampak positif dari implementasi suatu kebijakan.

4.7. Dampak Terhadap Aspek Sosial: Tanggapan masyarakat terhadap BUMDes

Aspek sosial lainnya, yaitu tanggapan masyarakat terhadap Bumdes. Aspek mempunyai 3 indikator, yakni dukungan masyarakat terhadap Bumdes, masyarakat tidak peduli terhadap Bumdes, serta masyarakat menolak Bumdes. Indikator pertama yang akan dibahas yaitu dukungan masyarakat terhadap Bumdes.

Tabel 3. 23.

Dukungan Masyarakat Terhadap Bumdes

No	Pilihan Jawaban	Frekuensi	Persentase	Skor Frekuensi
1	Sangat setuju [5]	26	41%	130
2	Setuju [4]	24	37%	96
3	Ragu-ragu [3]	5	8%	15
4	Tidak setuju [2]	5	8%	10
5	Sangat tidak setuju [1]	4	6%	4
	Total Skor	64	100%	255

Sumber : Kuesioner, 2020.

Menurut pengurus Bumdes yang menjadi responden, mayoritas masyarakat mendukung keberadaan Bumdes di desa mereka. Paling tidak 50 dari 64 responden yang menyatakan demikian. Memang pada kenyataannya, Bumdes memberikan beberapa manfaat kepada masyarakat desa dimana Bumdes tersebut berada. Diantara manfaat tersebut, yakni kemudahan dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat, adanya tempat untuk menampung produk atau komoditas yang dihasilkan masyarakat, serta suasana bumdes yang lebih maju dibanding warung tradisional. Kategori indikator ini **Baik dengan total skor 255**.

Tabel 3. 24.

Masyarakat Tidak Perduli Terhadap Bumdes

No	Pilihan Jawaban	Frekuensi	Persentase	Skor Frekuensi
1	Sangat setuju [5]	5	8%	25
2	Setuju [4]	5	8%	20
3	Ragu-ragu [3]	9	14%	27
4	Tidak setuju [2]	17	26%	34
5	Sangat tidak setuju [1]	28	44%	28
	Total Skor	64	100%	134

Sumber : Kuesioner, 2020.

Mengenai apakah masyarakat perduli atau tidak terhadap keberadaan bumdes, kelihatannya sebagian besar responden menyatakan bahwa masyarakat perduli. Hal ini ditunjukkan dengan jawaban “ tidak setuju” sebanyak 17 responden serta “sangat tidak setuju” berjumlah 28 orang terhadap pernyataan “masyarakat tidak

perduli terhadap Bumdes”. Jadi ada 45 responden atau 70% yang menyangkal bahwa masyarakat tidak perduli.

Sedangkan data tentang apakah masyarakat menolak keberadaan bumdes di suatu desa, ini dapat dilihat pada 3.25.

Tabel 3. 25.
Masyarakat Menolak Bumdes

No	Pilihan Jawaban	Frekuensi	Persentase	Skor Frekuensi
1	Sangat setuju [5]	5	8%	25
2	Setuju [4]	5	8%	20
3	Ragu-ragu [3]	5	8%	15
4	Tidak setuju [2]	29	45%	58
5	Sangat tidak setuju [1]	20	31%	20
	Total Skor	64	100%	138

Sumber : Kuesioner, 2020.

Data menunjukkan, sejumlah 49 orang atau 76% yang ditanya menyatakan bahwa masyarakat tidak menolak eksistensi bumdes di desanya masing-masing. Untuk aspek ini, masyarakat memberikan dukungan, perduli, serta tidak menolak keberadaan bumdes di desa mereka masing-masing.

Di bawah ini disajikan rekapitulasi aspek sosial, khususnya tanggapan masyarakat terhadap Bumdes.

Tabel 3.26.

**Rekapitulasi Skor Dan Kategori Aspek Sosial, Khususnya
Tanggapan Masyarakat Terhadap Bumdes Per Indikator**

No	Indikator	Total Skor	Kategori
1	Dukungan masyarakat terhadap Bumdes	255	Baik
2	Masyarakat tidak setuju tidak peduli thdp Bumdes	134	Tidak Baik
3	Masyarakat menolak Bumdes	138	Tidak Baik
	Skor rata-rata	176	CUKUP

Sumber: Total skor masing-masing indikator

Secara rata-rata, skor aspek sosial, khususnya tanggapan masyarakat terhadap bumdes adalah sebesar **176**. Ini maknanya aspek ini berada dalam **kategori cukup**.

4.8. Dampak Terhadap Aspek Lingkungan: Ketersediaan bahan baku usaha

Dampak terhadap lingkungan merupakan salah satu aspek yang diteliti dalam riset ini, khususnya yang berhubungan dengan ketersediaan bahan baku usaha Bumdes. Analisisnya adalah seperti berikut ini.

Tabel3. 27.

Bahan Baku Bisnis Bumdes Dari Desa

No	Pilihan Jawaban	Frekuensi	Persentase	Skor Frekuensi
1	Sangat setuju [5]	16	25%	80
2	Setuju [4]	10	16%	40
3	Ragu-ragu [3]	9	14%	27
4	Tidak setuju [2]	8	12%	16
5	Sangat tidak setuju [1]	21	33%	21
	Total Skor	64	100%	184

Sumber : Kuesioner, 2020.

Dari tabel 3.27 di atas, terlihat bahwa mayoritas responden, 29 atau 45% merasa bahwa bahan baku bisnis yang mereka jalani tidak berasal dari desa mereka. Apalagi, bisnis di Bumdes mereka berupa bahan jadi, seperti sembako, usaha tenda dan perlengkapan kenduri, pernik-pernikhand phone, alat tulis, pupuk tanaman, dan lain sebagainya. Namun, cukup banyak juga yang mengaku bahwa bisnis mereka berasal dari bahan baku di desa mereka sendiri, misalnya, usaha jual-beli getah karet, kopi bubuk, produk dari buah setempat, makanan dengan bahan baku dari desa, seperti buah pisang, ubi, ketela, produk buah coklat, maupun produk buah kelapa. Total skor untuk indikator ini adalah **184 dan kategorinya adalah cukup.**

Selanjutnya, hasil penelitian yang berkenaan dengan bahan baku yang bersifat alami dari desa sendiri.

Tabel 3. 28.

Bahan Baku Yang Bersifat Alami Dari Desa Sendiri.

No	Pilihan Jawaban	Frekuensi	Persentase	Skor Frekuensi
1	Sangat setuju [5]	10	16%	50
2	Setuju [4]	8	12%	24
3	Ragu-ragu [3]	21	32%	63
4	Tidak setuju [2]	16	25%	32
5	Sangat tidak setuju [1]	10	15%	10
	Total Skor	64	100%	179

Sumber : Kuesioner, 2020.

Tidak banyak Bumdes dimana bisnis atau produk usaha mereka berasal dari bahan baku alam. Hanya 18 Bumdes atau 28 % menyatakan demikian. Total skornya **179 dan terkategori cukup.**

Tabel 3. 29.

Kemudahan Mendapatkan Baku

No	Pilihan Jawaban	Frekuensi	Persentase	Skor Frekuensi
1	Sangat setuju [5]	17	26%	85
2	Setuju [4]	14	22%	56
3	Ragu-ragu [3]	7	11%	21
4	Tidak setuju [2]	12	19%	24
5	Sangat tidak setuju [1]	14	22%	14
	Total Skor	64	100%	200

Sumber : Kuesioner, 2020.

Bagi Bumdes yang menjalankan bisnis dimana bahan baku produknya adalah bahan baku alami dan berasal dari desa yang bersangkutan, maka mudah bagi mereka untuk mendapatkan bahan baku tersebut, sebagai contoh Bumdes dengan usaha jual-beli getah karet, kopi bubuk, produk dari buah setempat, makanan dengan bahan baku dari desa, seperti buah pisang, ubi, ketela, produk buah coklat, maupun produk buah kelapa. Paling tidak ada sebanyak 38% atau 31 responden yang menyatakan demikian. Indikator ini termasuk kategori **Cukup** sebab total skornya adalah **200**.

Tabel 3.30.

Rekapitulasi Skor Dan Kategori Aspek Lingkungan, khususnya Ketersediaan bahan baku usaha, Bumdes Per Indikator

No	Indikator	Total Skor	Kategori
1	Bahan Baku Bisnis Bumdes Dari Desa	184	cukup
2	Bahan Baku Yang Bersifat Alami Dari Desa Sendiri	179	cukup
3	Kemudahan Mendapatkan Baku	200	cukup
	Skor rata-rata	176	CUKUP

Sumber: Total skor masing-masing indikator

4.9. Dampak Terhadap Aspek Lingkungan: Perlakuan sisa bahan baku Produksi

Dimensi selanjutnya yang akan dibahas, yakni masih dari aspek lingkungan, tetapi yang berhubungan dengan perlakuan Bumdes terhadap sisa bahan baku produksi. Indikator dimensi ini yang akan dibahas terlebih dahulu adalah Produksi Bumdes menyisakan limbah.

Tabel 3.31.

Produksi Bumdes Menyisakan Limbah

No	Pilihan Jawaban	Frekuensi	Persentase	Skor Frekuensi
1	Sangat setuju [5]	5	8%	25
2	Setuju [4]	15	23%	60
3	Ragu-ragu [3]	8	12%	24
4	Tidak setuju [2]	20	32%	40
5	Sangat tidak setuju [1]	16	25%	16
	Total Skor	64	100%	165

Sumber : Kuesioner, 2020.

Sehubungan dengan apakah produksi Bumdes menimbulkan limbah yang dapat mencemari lingkungan atau tidak, dari 64 responden, 36 diantaranya atau 57 % menyatakan bahwa Bumdes mereka tidak menimbulkan limbah. Namun, memang ada Bumdes yang dalam produksinya menyebabkan adanya limbah, bumdes ini, misalnya, yang memproses kopi bubuk, buah coklat, getah karet, buah-buahan yang dijadikan makanan siap makan, dan lain sebagainya. Namun limbah ini tidak banyak dan sudah dianggap lazim di kalangan mereka. Adapun jumlah bumdes dalam kelompok ini sebanyak 20 bumdes atau sebesar 31%. Indikator ini masuk dalam kategori **tidak baik** sebab total skornya 165.

Secara normatif, limbah seharusnya diproses dengan baik agar tidak mencemari lingkungan. Disamping itu, agar limbah yang sudah diproses dapat menyatu dengan aman dengan alam lingkungan. Tentang apakah limbah Bumdes mereka didaur ulang atau tidak, datanya dapat dilihat dalam tabel 3.32 di bawah ini.

Tabel 3.32.**Limbah Bahan Baku Didaur-Ulang**

No	Pilihan Jawaban	Frekuensi	Persentase	Skor Frekuensi
1	Sangat setuju [5]	5	8%	25
2	Setuju [4]	25	40%	100
3	Ragu-ragu [3]	16	25%	48
4	Tidak setuju [2]	10	15%	20
5	Sangat tidak setuju [1]	8	12%	8
	Total Skor	64	100%	201

Sumber : Kuesioner, 2020.

Tabel 3.32 menunjukkan cukup banyak bumdes yang mendaur ulang limbah yang dihasilkannya. Jumlahnya sebanyak 30 Bumdes atau 48%. Sementara Bumdes yang tidak melakukan hal tersebut sebanyak 18 Bumdes. Sisanya, ragu-ragu apakah bumdesnya mendaur ulang limbah Bumdes mereka. Kategori indikator ini yaitu **cukup** dengan total skor **201**.

Tabel 3.33.**Limbah Dibuang Sembarang**

No	Pilihan Jawaban	Frekuensi	Persentase	Skor Frekuensi
1	Sangat setuju [5]	4	6%	20
2	Setuju [4]	5	8%	20
3	Ragu-ragu [3]	13	20%	39
4	Tidak setuju [2]	21	33%	42
5	Sangat tidak setuju [1]	21	33%	21
	Total Skor	64	100%	142

Sumber : Kuesioner, 2020.

Seringkali, limbah berkonotasi negatif. Oleh karena itu, material ini tidak boleh dibuang secara sembarangan, melainkan harus dikelola dengan sebaik-baiknya. Mengenai apakah limbah bumdes dibuang dengan sembarangan atau tidak, 66 % atau 42 responden menyatakan mereka tidak membuang limbah produksi mereka dengan sembarangan. Sembarangan disini bermakna dibuang asal saja di sembarang tempat. Memang ada beberapa Bumdes yang membuang limbah mereka sembarangan. Namun sebagian besar bumdes memperlakukan limbah mereka dengan cukup baik, misalnya dengan menanam limbah [sisa kulit buah coklat, sisa proses kopi, kulit buah-buahan] tersebut. Ada juga yang menyusun limbah di pinggir semak-semak, misalnya kulit kelapa, batok bekas tampung getah karet, dll]. Walaupun perlakuan mayoritas Bumdes terhadap limbah mereka cukup baik, namun total skor indikator ini kecil, hanya **142 dan kategori tidak baik**, karena jumlah responden [21 yang tidak setuju serta 21 yang sangat tidak setuju] dikalikan dengan rendahnya nilai pilihan jawaban responden – yaitu nilai 2 dan 1.

Nilai masing-masing indikator daripada aspek lingkungan tentang perlakuan terhadap sisa bahan baku produksi direkapitulasi dalam tabel 3.34 di berikut ini.

Tabel 3.34

**Rekapitulasi Skor Dan Kategori Aspek Lingkungan, Khususnya
Perlakuan Terhadap Sisa Bahan Baku Produksi Bumdes Per
Indikator**

No	Indikator	Total Skor	Kategori
1	Produksi Bumdes menimbulkan limbah [sisa bahan baku]	165	Tidak Baik
2	Limbah Bahan Baku didaur ulang	201	Cukup
3	Limbah dibuang sembarangan	142	Tidak Baik
	Skor rata-rata	169	CUKUP

Sumber: Total skor masing-masing indikator

Selesai sudah pembahasan dampak implementasi kebijakandari aspek lingkungan.

4.10. Dampak Terhadap Aspek Politik: Keterlibatan unsur Parpol

Pembahasan selanjutnya adalah dampak implementasi kebijakan dari aspek politik. Aspek politik ini memiliki 3 indikator, yakni unsur parpol dalam pendirian Bumdes, bentuk keterlibatan parpol, serta keterlibatan parpol secara intens. Masing-masing indikator akan dianalisis seperti berikut ini secara satu per satu.

Tabel 3.35

Tidak Ada Keterlibatan Unsur Parpol dalam Pendirian Bumdes

No	Pilihan Jawaban	Frekuensi	Persentase	Skor Frekuensi
1	Sangat setuju [5]	50	78%	250
2	Setuju [4]	14	22%	56
3	Ragu-ragu [3]	0	0%	0
4	Tidak setuju [2]	0	0%	0
5	Sangat tidak setuju [1]	0	0%	0
	Total Skor	64	100%	306

Sumber : Kuesioner, 2020.

Ini sangat fantastik. Bumdes didirikan memang hanya untuk kepentingan sosial-ekonomi desa dan masyarakat desa yang bersangkutan. Tanpa adanya unsur politik, terutama dalam bentuk campur tangan parpol. Ini bagus sebab benar-benar bersifat demokratis. Bila ada campur tangan parpol, maka ini akan berdampak dengan penggalangan suara politik masyarakat desa dalam berbagai pemilihan, baik pemilihan Kades, Bupati, anggota DPRD, dan lain sebagainya. 100 % atau seluruh responden menyatakan bahwa sebagai pengurus Bumdes di desa mereka, mereka tidak terafiliasi dengan parpol manapun serta tidak ada bantuan dari parpol apapun. Indikator ini berada pada posisi **sangat baik dengan total skor 306.**

Diskusi dilanjutkan dengan indikator kedua dari aspek politik, yaitu bentuk keterlibatan unsur parpol.

Tabel 3.36.**Tidak Ada Bentuk Apapun Keterlibatan Unsur Parpol.**

No	Pilihan Jawaban	Frekuensi	Persentase	Skor Frekuensi
1	Sangat setuju [5]	50	78%	250
2	Setuju [4]	14	22%	56
3	Ragu-ragu [3]	0	0%	0
4	Tidak setuju [2]	0	0%	0
5	Sangat tidak setuju [1]	0	0%	0
	Total Skor	64	100%	306

Sumber : Kuesioner, 2020.

Sebagai konsekuensi logis dari ketiadaan keterlibatan parpol dalam pendirian dan pengelolaan Bumdes adalah tidak adanya bentuk keterlibatan apapun. Ini karena parpol memang tidak terlibat sama sekali. Semua responden menjawab sangat setuju atau setuju bahwa parpol tidak terlibat sama sekali dalam bentuk apapun di Bumdes. Kategori indikator ini maksimal, yaitu **sangat baik dengan totalskor 306.**

Tabel 3.37**Tidak Ada Keterlibatan Parpol Secara Intens**

No	Pilihan Jawaban	Frekuensi	Persentase	Skor Frekuensi
1	Sangat setuju [5]	50	78%	250
2	Setuju [4]	14	22%	56
3	Ragu-ragu [3]	0	0%	0
4	Tidak setuju [2]	0	0%	0
5	Sangat tidak setuju [1]	0	0%	0
	Total Skor	64	100%	306

Sumber : Kuesioner, 2020.

Kondisi indikator terakhir dari dampak aspek politik yaitu intensitas keterlibatan parpol pada Bumdes sama dengan kedua indikator sebelumnya, yaitu **sangat baik dengan totalskor 306**.

Rekapitulasi dampak aspek politik adalah seperti di bawah ini.

Tabel 3.38
Rekapitulasi Skor Dan Kategori Aspek Politik, Khususnya
Perlakuan Terhadap Sisa Bahan Baku Produksi Bumdes
Per Indikator

No	Indikator	Total Skor	Kategori
1	Tidak Ada Keterlibatan Unsur Parpol dalam Pendirian Bumdes	306	Sangat Baik
2	Tidak Ada Bentuk Apapun Keterlibatan Unsur Parpol.	306	Sangat Baik
3	Tidak Ada Keterlibatan Parpol Secara Inten	306	Sangat Baik
	Skor rata-rata	306	Sangat Baik

Sumber: Total skor masing-masing indikator

4.11. Dampak Terhadap Aspek Politik: Afiliasi/menjalin hubungan dengan parpol

Aspek terakhir dari dampak implementasi kebijakan, yaitu Peraturan Daerah [Perda] Kabupaten Musi Rawas nomor 10 tahun 2013 tentang pendirian dan prosedur pengelolaan Badan Usaha Milik Desa {Bumdes}, yaitu aspek politik, khususnya afiliasi bumdes dengan parpol.

Tabel 3.39**Tidak Ada Hubungan Khusus Bumdes Dengan Parpol**

No	Pilihan Jawaban	Frekuensi	Persentase	Skor Frekuensi
1	Sangat setuju [5]	50	78%	250
2	Setuju [4]	14	22%	56
3	Ragu-ragu [3]	0	0%	0
4	Tidak setuju [2]	0	0%	0
5	Sangat tidak setuju [1]	0	0%	0
	Total Skor	64	100%	306

Sumber : Kuesioner, 2020.

Secara de facto, Bumdes di Kabupaten Musi Rawas tidak mempunyai hubungan dengan parpol di daerah itu, khususnya hubungan yang spesial. Semua responden menjawab demikian. Begitupun dengan pengurus Bumdes. Tidak ada yang berasal dari parpol tertentu.

Tabel 3.40**Tidak Ada Pengurus Bumdes dari parpol**

No	Pilihan Jawaban	Frekuensi	Persentase	Skor Frekuensi
1	Sangat setuju [5]	50	78%	250
2	Setuju [4]	14	22%	56
3	Ragu-ragu [3]	0	0%	0
4	Tidak setuju [2]	0	0%	0
5	Sangat tidak setuju [1]	0	0%	0
	Total Skor	64	100%	306

Sumber : Kuesioner, 2020.

Merujuk kepada tabel 3.40 di atas, dapat diketahui bahwa pengurus Bumdes tidak ada yang berasal dari parpol. Semua Bumdes mengatakan demikian. Ternyata, Bumdes tidak juga mewakili kepentingan parpol. Lihat tabel 3.41 berikut ini.

Tabel 3.41
Bumdes Tidak Mewakili Kepentingan Parpol

No	Pilihan Jawaban	Frekuensi	Persentase	Skor Frekuensi
1	Sangat setuju [5]	50	78%	250
2	Setuju [4]	14	22%	56
3	Ragu-ragu [3]	0	0%	0
4	Tidak setuju [2]	0	0%	0
5	Sangat tidak setuju [1]	0	0%	0
	Total Skor	64	100%	306

Sumber : Kuesioner, 2020.

Seratus persen Bumdes memang hanya mengurus kepentingan sosial-ekonomi Bumdes itu saja. Mereka tidak mewakili kepentingan parpol. Begitupun dengan pengarahan dari pihak-pihak tertentu. Tidak ada yang mengarahkan kepada kepentingan parpol tertentu.

Tabel 3.42
Tidak Ada Pengarahan Yang Mengarah Ke Parpol

No	Pilihan Jawaban	Frekuensi	Persentase	Skor Frekuensi
1	Sangat setuju [5]	50	78%	250
2	Setuju [4]	14	22%	56
3	Ragu-ragu [3]	0	0%	0
4	Tidak setuju [2]	0	0%	0

5	Sangat tidak setuju [1]	0	0%	0
	Total Skor	64	100%	306

Sumber : Kuesioner, 2020.

Berdasarkan kepada diskusi di atas, dapat diketahui bahwa pendirian and pengelolaan Bumdes di Kabupaten Musi Rawas tidak berdampak kepada kepentingan politik partai politik tertentu. Bumdes murni mengurus kepentingan sosial-ekonomi desa dan masyarakat desa.

Secara keseluruhan mengenai kategori masing-masing indikator aspek politik, khususnya dari sudut pandang afiliasi Bumdes dengan parpol dapat dilihat dalam tabel rekapitulasi di bawah ini.

Tabel 3.43

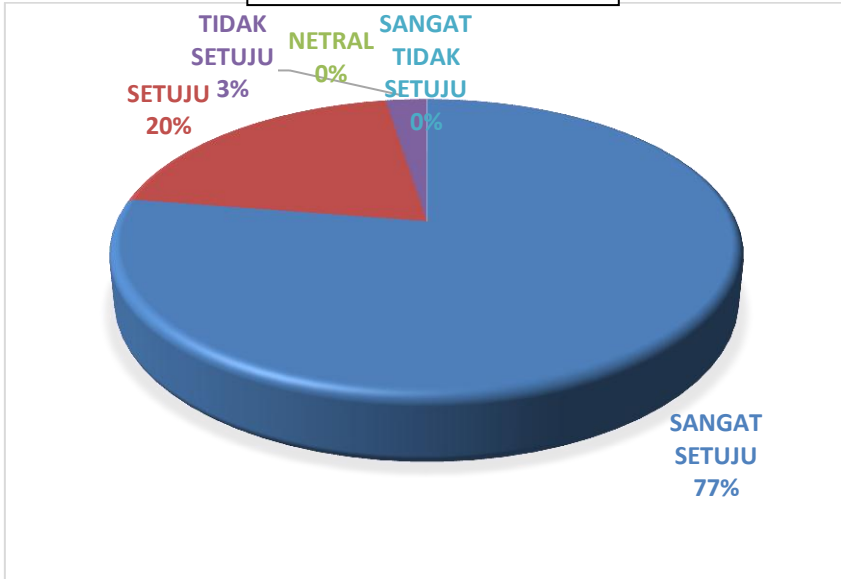
Rekapitulasi Skor Dan Kategori Aspek Politik, Khususnya afiliasi Bumdes dengan Partai Politik Tertentu Per Indikator

No	Indikator	Total Skor	Kategori
1	Tidak Ada Hubungan khusus Bumdesdengan parpol	306	Sangat Baik
2	Tidak Ada Pengurus Bumdesdari Parpol.	306	Sangat Baik
3	BUMDes tidak mewakili kepentingan parpol	306	Sangat Baik
4	Tidak ada Pengarahan pengurus Bumdes yang mengarah ke parpol	306	Sangat Baik
	Skor rata-rata	306	Sangat Baik

Sumber: Total skor masing-masing indikator

Grafik 1

Perbaikan Bumdes



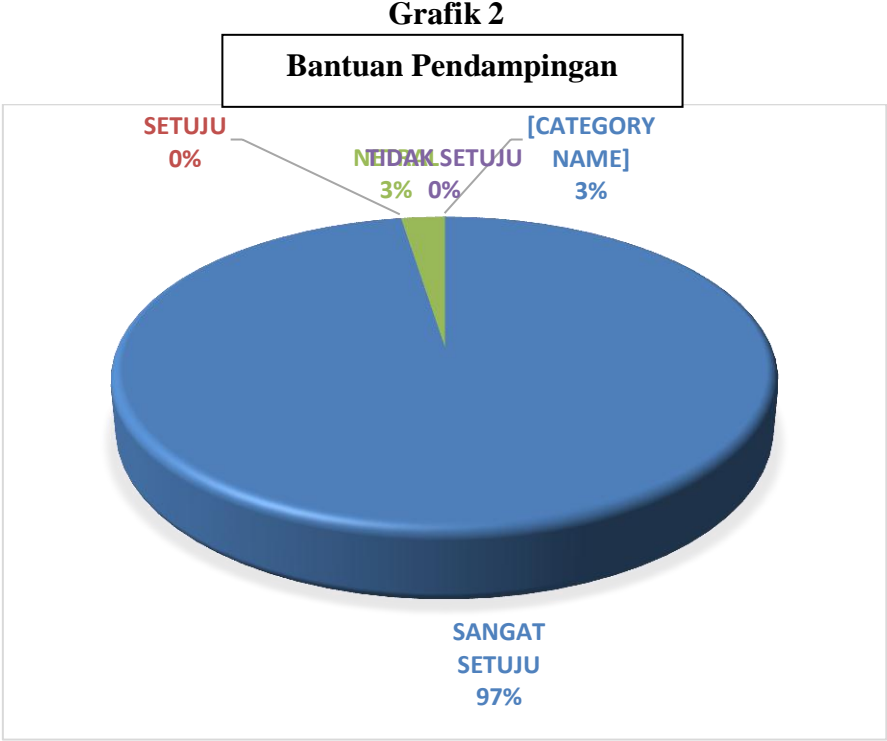
Sumber: Data lapangan diolah oleh peneliti, 2020

Aspek ekonomi terkait dengan kemajuan usaha, 77% informan sepakat bahwa BUMDes yang mereka kelola mengalami kemajuan. Kamajuan ini dapat didukung dari beberapa faktor yaitu bantuan yang diberikan oleh pemerintah dan ada asosiasi yang diikuti oleh BUMDes, salah satu asosiasi yang diikuti adalah Forum BUMDes Indonesia di kabupaten Musi Rawas. Sehingga dengan bantuan tersebut BUMDes di Musi Rawas 100% mendapatkan keuntungan dari usaha yang dijalani. Meskipun banyak BUMDes baru mengalami pergantian kepengurusan namun BUMDes terus berjalan dan mendapatkan keuntungan, hal ini dibuktikan dengan semenjak kepemimpinan baru BUMDes tetap mengalami perkembangan yaitu sebesar 100% informan menyatakan mendapatkan peningkatan.

Keberadaan BUMDes bagi masyarakat adalah sebuah solusi yang ditawarkan dalam kondisi masyarakat yang susah dalam mendapatkan produk yang mereka inginkan, dengan menjadi konsumen maka secara tidak langsung BUMDes dan masyarakat saling menguntungkan. Masyarakat terbantuan dengan keberadaan BUMDes. Peran masyarakat tidak kalah penting dalam proses perkembangan BUMDes. Masyarakat adalah aktor yang cukup penting bagi BUMDes. Menurut Putra (2005) dalam (Suharto, 2007) aktor menjadi hal yang terpenting dalam setiap kebijakan, Putra (2005) membagi stakeholder dalam tiga kelompok yaitu: 1) Stakeholder kunci: mereka yang memiliki kewenangan secara legal untuk membuat keputusan, 2) stakeholder primer: mereka yang memiliki kaitan kepentingan secara langsung dengan suatu kebijakan, program atau proyek, 3) stakeholder: mereka yang yang tidak memiliki kaitan kepentingan langsung dengan suatu kebijakan, program, dan proyek, namun memiliki pedulian dan perhatian sehingga mereka turut berpartisipasi untuk mempengaruhi keputusan pemerintah.

Adapun dari aspek pendampingan, dapat diketahui bahwa kebijakan yang diberikan oleh pemerintah kabupaten kepada BUMDes sehingga dengan pendampingan yang diberikan oleh pemerintah BUMDes mengalami peningkatan baik kemandirian maupun keuntungan BUMDes. Data diatas adalah hasil dari lapangan yang diolah oleh peneliti. Data tersebut menunjukkan bahwa pemerintah kabupaten memberikan bantuan kepada BUMDes. Beberapa bantuan yang diberikan adalah berupa pendampingan, pelatihan dan modal. Aspek ekonomi peningkatan modal usaha

BUMDes di kabupaten Musi Rawas cukup baik yaitu BUMDes banyak mengalami peningkatan setelah adanya bantuan pendampingan dari pemerintah.



Sumber: Data lapangan diolah oleh peneliti, 2020

Bila digambarkan dalam diagram lingkaran bantuan pendampingan yang diberikan oleh pemerintah dengan jumlah 97% informan sepatutnya bahwa BUMDes mendapatkan bantuan pendampingan. Bantuan pendampingan ini dimanfaatkan oleh pengelola BUMDes untuk mengembangkan BUMDes. Sehingga BUMDes mandiri secara ekonomi. Pendirian BUMDes tidak terlepas dari potensi desa yang mungkin selama ini belum tergali. Oleh karena itu, kajian (Sidik, 2015), memperlihatkan bagaimana kemudian potensi desa ini digali atau dikembangkan guna mewujudkan kemandirian desa. Dengan

kebijakan pendirian BUMDes sedikit tidaknya memberikan keuntungan bagi masyarakat desa. BUMDes adalah satu bentuk implementasi kebijakan oleh Pemerintah Kabupaten Musi Rawas. Implementasi kebijakan menurut Grindle (1980) bahwa kebijakan ditransformasikan menjadi program aksi maupun proyek individual dan biaya telah disediakan sehingga implementasi kebijakan dapat dilakukan yang dilihat dari isi dan konteks kebijakannya(Wibawa, 1994). Implementasi yang akan dilakukan dalam isi kebijakan adalah; (1) kepentingan yang dipengaruhi oleh kebijakan, (2) jenis manfaat yang dihasilkan, dalam hal ini kebijakan memberikan manfaat yang actual (bukan hanya forma, ritual, dan simbolis), (3) derajat perubahan yang diinginkan, (4) kedudukan pembuat kebijakan, (5) siapa pelaksana program dan (6) sumber daya yang dikerahkan. Konteks kebijakan mempengaruhi proses Implementasi sebagaimana pengaruh dari kondisi sosial, ekonomi, politik dan budaya; (1) Kekuasaan, kepentingan dan strategi aktor yang terlibat, (2) Karakteristik lembaga dan penguasa, (3) Kepatuhan dan daya tanggap.

BAB V

KEBIJAKAN PEMBERDAYAAN DAN PEMASARAN PRODUK BUMDes BERBASIS *E-COMMERCE* DI KABUPATEN MUSI RAWAS

5.1.Deskripsi Data Bumdes Yang Menjadi Subjek Penelitian

BUMDes didirikan atas dasar kebijakan pemerintah dengan tujuan untuk pengembangan desa atau membangun desa. Proses pendirian BUMDes melibatkan masyarakat, perangkat, kades dan BPD desa. Berikut adalah deskripsi data BUMDes yang menjadi subjek penelitian :

Tabel 4.1.

Deskripsi Data Bumdes

No	BUMDes	Jenis Usaha	Informan	Jabatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Tri Jasa Karya	Simpan Pinjam	Joko Purwanto (JP)	Bendahara
2	Tri Jasa Karya	Simpan Pinjam	Yayan Liansyah	Ketua
3	Sidomulyo(L sidoharjo)	Pakan Ikan lele	Andika Albiansy	Tokoh Pemuda
4	Sidomulyo (L sidoharjo)	Pakan Ikan lele	Reka	Ketua
5	Peduli Sesama	Jenis Usaha Simpan Pinjam, Bagi Hasil modal Usaha Batu Bata	Suwono	Ketua
6	Peduli Sesama	Jenis Usaha Simpan Pinjam, Bagi Hasil modal Usaha Batu Bata	Reonaldi	Wakil

7	Cahaya Bening	Sewa Tempat, Sewa Kontainer, Angkringan	Pak Edi Sukandy	Ketua
8	Cahaya Bening	Sewa Tempat, Sewa Kontiner, Angkringan	Siti Romalinda	Kaur Perencanaan
9	Sejahtera	ATK, Konveksi, Bibit, Isi Ulang air minum	Yogi Andrian	Tokoh Pemuda
10	Sejahtera	ATK, Konveksi, Bibit, Isi Ulang air minum	Pak Kamaludin (Y)	Katua
11	Unggul Sejahtera	Pamsimas, ternak ikan, ShopeePAY, Gas Elpiji	Erika	Tokoh Masyarakat
12	Unggul Sejahtera	Pamsimas, ternak ikan, ShopeePAY, Gas Elpiji	Dewi Masito	Ketua
13	Cintra Mandiri	Perdagangan, sewa taruf, gaduhan hewan, Gas LPG	Dewi Kartika	Sekretaris
14	Maju Bersama	Simpan Pinjam	Mini	Direktur
15	Jaya Mulya	Perdagangan Tempat Wisata	Arya	Bendahara
16	Nur Cahaya	Jenis Usaha: Perdagangan, Gaduhan Sapi	Karsim	Bendahara
17	Petong Mandiri	Galon isi Ulang (Kangen Water, peternakan)	Marzulian	Direktur
18	Peduli bersama	Simpan Pinjam	Sunarto	Pengawas Bumdes
19	Sayosae	Perdagangan LPG	Anton	Sekretaris
20	Maju Bersama (triwikaton)	Konveksi Baju Sekolah	ujang	Kepala Unit Konveksi

Sumber: Data Primer, 2021

Terlihat bahwa ada beragam produk yang dijual atau bentuk usaha yang dijalankan oleh Bumdes. Hal ini mulai dari peternakan, garmen, makanan dan minuman serta kebutuhan-kebutuhan masyarakat desa lainnya. Semuanya tentu saja dalam rangka untuk memperoleh penghasilan desa.

5.2. Cara Pemasaran Produk Bumdes

4.2. Gambaran Cara Pemasaran Produk Bumdes

No	BUMDes	Jenis Usaha	Cara Pemasaran Produk <i>e-commerce</i>
(1)	(2)	(3)	(6)
1	Tri Jasa Karya	Simpan Pinjam	offline
2	Tri Jasa Karya	Simpan Pinjam	offline
3	Sidomulyo(L sidoharjo)	Pakan Ikan lele	Offline dan online
4	Sidomulyo (L sidoharjo)	Pakan Ikan lele	Offline dan online
5	Peduli Sesama	Jenis Usaha Simpan Pinjam, Bagi Hasil modal Usaha Batu Bata	Offline
6	Peduli Sesama	Jenis Usaha Simpan Pinjam, Bagi Hasil modal Usaha Batu Bata	Offline
7	Cahaya Bening	Sewa Tempat, Sewa Kontainer, Angkringan	Offline dan Online (aplikasi facebook)
8	Cahaya Bening	Sewa Tempat, Sewa Kontiner, Angkringan	Offline dan Online (aplikasi facebook)
9	Sejahtera	ATK, Konveksi, Bibit, Isi Ulang air minum	Online (facebook dan whatshap) dan offline
10	Sejahtera	ATK, Konveksi, Bibit, Isi Ulang air minum	Online (facebook dan whatshap) dan offline
11	Unggul Sejahtera	Pamsimas, ternak ikan, Shopepay, Gas Elpiji	Online (facebook dan whatshap) dan offline
12	Unggul Sejahtera	Pamsimas, ternak ikan, Shopepay, Gas Elpiji	Online (facebook dan whatshap) dan offline
13	Cintra Mandiri	Perdagangan, sewa taruf, gaduhan hewan, Gas LPG	Online (facebook dan whatshap) dan offline

14	Maju Bersama	Simpan Pinjam	Online (facebook dan whatshap) dan offline
15	Jaya Mulya	Perdagangan Tempat Wisata	Online (facebook dan whatshap) dan offline
16	Nur Cahaya	Jenis Usaha: Perdagangan, Gaduhan Sapi	Online (facebook dan whatshap) dan offline
17	Petong Mandiri	Galon isi Ulang (Kangen Water, peternakan)	Online (facebook dan whatshap) dan offline
18	Peduli bersama	Simpan Pinjam	Online (facebook dan whatshap) dan offline
19	Sayosae	Perdagangan LPG	Online (facebook dan whatshap) dan offline
20	Maju Bersama (triwikaton)	Konveksi Baju Sekolah	Online (facebook dan whatshap) dan offline

Sumber: Data Primer, 2021

Secara garis besar BUMDes di Kabupaten Musi Rawas cukup berhasil dalam pengembangan produk usaha, hal ini dapat dibuktikan dengan pemasaran BUMDes dilakukan secara online maupun offline. Sebagian besar **e-commerce** yang digunakan oleh BUMDes adalah aplikasi facebook dan Whatshap, ada beberapa BUMDes yang menggunakan aplikasi Instagram, Whatsapp, aplikasi Shopee dan Bukalapak. Seperti yang diungkapkan oleh bapak Suwono:

“Cara pemasaran produk BUMDes saat ini yaitu melalui online yaitu sudah menerapkan pemasaran produk BUMDes yang berbasis e-commerce (pemasaran online) pemasaran tersebut dilakukan dalam aplikasi facebook”.

Keberhasilan BUMdes ditentukan oleh Sumber Daya Manusia yang kreatif dan modal yang cukup. Sumber Daya Manusia yang kreatif akan menentukan produk yang akan dijual, hal ini dilakukan

untuk menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. Namun ada beberapa BUMDes yang masih belum berkembang hal ini di pengaruhi oleh Sumber Daya Manusia yang tidak kreatif dan kurangnya modal, disamping itu pergantian kepengurusan yang lamban akan menjadi salah satu factor kegagalan BUMDes, dengan begitu masyarakat belum merasakan keberadaan BUMDes di Desa.

Kepala desa adalah orang yang sangat berperan dalam keberadaan BUMdes, baik dari pengadaan modal dan keberlangsungan BUMdes. Sebagai seorang yang berperan secara langsung dalam berjalannya BUMdes tentunya akan menentukan keberhasilan BUMdes. Kepala desa juga sangat berperan dalam menentukan kepengurusan BUMdes, hal ini dilakukan melalui rapat bersama BPD dan perangkat desa. Pergantian kepengurusan sebaiknya disegerakan dengan tujuan BUMdes akan tetap berjalan dengan begitu manfaat BUMDes benar-benar bisa dirasakan oleh masyarakat yang merasakan baik laki-laki, perempuan, anak-anak, masyarakat miskin, elite desa, masyarakat golongan mana saja.

e-commerce

Kurangnya perhatian pemerintah Kabupaten terhadap BUMDes menyebabkan BUMdes sulit berkembang. Meskipun ada pelatihan yang diberikan namun belum memberikan dampak yang besar bagi keberhasilan BUMDes. Seperti saat ini yang dibutuhkan oleh BUMDes adalah pelatihan pemasaran secara online, mengingat dizaman teknologi dan pandemic covid'19 menuntut penjualan produk melalui online. Namun sebagian besar BUMDes belum memahami *e-commerce*. *e-commerce* saat ini sangat penting dalam pemasaran

produk, hal ini dilakukan dengan tujuan untuk menjangkau konsumen dengan muda tidak harus bertatap muka. Meskipun ketersediaan dan kualitas sarana dan prasarana pemasaran berbasis e-commerce jaringan internet, kuota, sangat baik namun BUMDes belum bisa memanfaatkannya. Pelatihan *e-commerce* sangat diperlukan dalam kemajuan dan keberlangsungan BUMDes. Ada beberap BUMDes yang menggunakan aplikasi facebook dan whatshap dalam proses pemasaran, namun dalam pengemasan iklan atau desain iklan belum menarik perhatian konsumen. Sehingga perlunya pelatihan desain produk yang menarik untuk produk BUMDes.

Kendala yang dihadapi dalam pemasaran melalui *e-commerce* adalah desain iklan yang kurang menarik dan perubahan harga produk juga menentukan keberhasilan penjualan. Harga produk yang tidak stabil di pasaran membuat BUMDes sulit menentukan harga, tidak jarang sering terjadi perubahan harga produk BUMDes. Seperti yang diungkapkan Bapak Edi Sukandy Ketua BUMDes Cahaya Bening dan Yogi Andrian (Y) tokoh pemuda , Pak Kamaludin (Y) ketua BUMDes sejahtera.

“...Kendala-kendala yang dihadapi terkait pemasaran berbasis e-commerce adalah kurangnya menarik design iklan produk” Bapak Edy Sukandy.

“...Adapun kendala-kendala apa yang dihadapi terkait pemasaran berbasis e-commerce adalah terkait dengan harga pakan ikan naik terus sehingga menyusahakan peternak ikan”.
Yogi Andrian (Y), Pak Kamaludin (Y).

BUMDes di kabuapten Musi Rawas banyak yang tertarik melakukan pemasaran melalui online atau *e-commerce* mengingat *e-commerce* sangat mendukung dalam proses penjualan produk BUMDes. Banyak BUMDes berpendapat bahwa pemasaran berbasis *e-commerce* yaitu:

1. Penjualan produk lebih mudah
2. BUMDes tidak memerlukan karyawan yang banyak
3. Mempermudah usaha
4. Mudah menjangkau konsumen
5. Bisa memberikan kritik dan saran secara langsung melalui online
6. Jaringan lebih luas.
7. Kerja santai dan tidak mengurangi energy.

BAB VI

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasannya, dapat diketahui hal-hal sebagai berikut:

1. Implementasi Peraturan Daerah [Perda] Kabupaten Musi Rawas nomor 10 tahun 2013 tentang pendirian dan prosedur pengelolaan Badan Usaha Milik Desa {Bumdes} di Kabupaten Musi Rawas berhasil. Hal ini dapat dilihat dari adanya kepatuhan terhadap perintah kebijakan tersebut, lancarnya pelaksanaan kegiatan usaha Bumdes, serta terwujudnya kinerja Bumdes dan dampak positif yang timbul dari berhasilnya implementasi kebijakan tersebut diatas.
2. Dampak yang timbul dari implementasi kebijakan tersebut bersifat positif dan menyangkut berbagai aspek, yaitu ekonomi, sosial, lingkungan, maupun politik.
3. Cara pemasaran produk dan barang-barang dagangan Bumdes beragam adanya yang secara off line maupun on line.

Daftar Pustaka

- Alfatih, Andy. ; 2010; Implementasi Program dan Pemberdayaan Masyarakat or in english, Program Implementation and Community Development. Bandung: Unpad Press.
- Alfatih, Andy; 2012; The Failure of Policy Implementation in Indonesia and The Breakthrough. *International seminar and conference on innovative government*. Malang: Universitas Brawijaya.
- Alfatih, Andy; 2019; Simple guidelines for carrying out quantitative descriptive research; Sriwijaya University Press; Palembang.
- DeNisi, Angelo S. and Pritchard, Robert D.; 2015; performance appraisal, performancemanagement and improving individual performance: a motivational framework; *Management and Organization Review*; Volume 2, Issue 2.
- Dye, Thomas R.; 2017; Understanding Public Policy, 15th Edition; Florida State University, Florida
- Edwards III, George C.; 1980; Implementing Public Policy; Congressional Quarterly Presspublisher, Washington D.C.
- Kokemuller, Neil; Advantages and Disadvantages of Product Differentiation, Azcentral, part of the USA today network, April 2018

- Ripley, Randall B. dan Franklin, Grace A., 1986, *Policy Implementation and Bureaucracy*,
The Dorsey Press, Chicago, Illinois.
- Riant Nugroho, 2016, *Kebijakan Publik di Indonesia*, Penerbit :
Pustaka Pelajar, Jakarta
- Riduwan, 2010. *Method and Technique of Writing Thesis*.
Penerbit Alfabeta, Bandung.
- Sujianto, Agus Eko; 2007; *Statistics Application with SPSS for
Beginner*; Prestasi Pustaka Publisher, Jakarta
- Sugiyono. 2010. *Statistics for Research*. Penerbit Alfabeta,
Bandung.
- Trainor, Gary; 2012; *Importance Of Compliance In Business;
How to Learn.Com.*; August, 2012
- Umar, Husein; 2004. *Research Method in Administration*; PT.
Gramedia Pustaka Umum, Jakarta.
- Wingerden, Jessica Van and Stoep, Joost Van der; 2018; *The
motivational potential of meaningful work: Relationships
with strengths use, work engagement, and
performance*, Plos One an open access journal, June 2018.

Peraturan

**Peraturan Daerah [Perda] Kabupaten Musi Rawas nomor 10
tahun 2013 tentang pendirian dan prosedur pengelolaan
Badan Usaha Milik Desa {Bumdes}.**

Kuesioner

Judul Penelitian

Dampak Kebijakan Pendirian Badan Usaha Milik Desa

[BUMDES]

[Studi terhadap BUMDES yang ada di Kabupaten Musi Rawas tahun 2020]

Identitas Para Peneliti:

1. Dr. Andy Alfatih, MPA> Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik [FISIP] Universitas Sriwijaya [UNSRI]
2. Dra. DyahHapsari, ENH, MSi> Dosen FISIP UNSRI
3. Dr.Diana Sari, S.Sos., MSi>Dosen FISIP UNSRI

Catatan:

1. Penelitian ini dilakukan dalam rangka melaksanakan tugas akademik dosen
2. Kami berharap agar bapak/ibudapat membantu kami dengan cara menjawab semua pertanyaan yang diajukan secara jujur berdasarkan pengetahuan bapak/ibu.
3. Data yang didapat dalam penelitian hanya akan digunakan untuk kepentingan ilmiah saja.
4. Kami mengucapkan banyak terima kasih atas bantuan bapak/ibu. Semoga bantuan ini sebagai dukungan bapak/ibu atas kemajuan dunia pendidikan tinggi dan merupakan amal ibadah bapak/ibu.

Identitas Responden

1. Nama :.....
2. Nama Bumdes:.....
3. Usaha Bumdes:.....
4. Nama Desa, Kelurahan dan Kabupaten:.....
5. Posisi kepengurusan di Bumdes:.....
6. Lama masa kepengurusan:.....
7. Tahun pendirianBumdes:.....

Pertanyaan

Aspek Ekonomi: Peningkatan modal usaha

1. Bumdes bapak/ibu mendapat bantuan modal usaha dari Pemda Kabupaten Musi Rawas atau pihak lain.
a) Sangat Setuju b) Setuju c) Netral
d) Tidak setuju e) Sangat tidak setuju

2. Bumdes bapak/ibu mendapat bantuan pelatihan teknis usaha dari Pemda Kabupaten Musi Rawas atau pihak lain.
a) Sangat Setuju b) Setuju c) Netral
d) Tidak setuju e) Sangat tidak setuju

3. Bumdes bapak/ibu mendapat bantuan pendampingan usaha dari Pemda Kabupaten Musi Rawas atau pihak lain.
a) Sangat Setuju b) Setuju c) Netral
d) Tidak setuju e) Sangat tidak setuju

4. Bumdes bapak/ibu sering mendapat bantuan usaha dari Pemda Kabupaten Musi Rawas atau pihak lain.
- a) Sangat Setuju b) Setuju c) Netral
d) Tidak setuju e) Sangat ttidak setuju
5. Bantuan/pinjaman yang diperoleh digunakan untuk pengembangan usaha Bumdes.
- a) Sangat Setuju b) Setuju c) Netral
d) Tidak setuju e) Sangat tidak setuju

Ekonomi: Kemajuan Usaha

6. Bumdes bapak/ibu dapat memperbaiki empat uusaha agar lebih baik.
- a) Sangat Setuju b) Setuju c) Netral
d) Tidak setuju e) Sangat tidak setuju
7. Barang dagangan / jasa yang dibisniskan Bumdes bapak/ibu semakin banyak/meningkat baik jumlah maupun kualitasnya.
- a) Sangat Setuju b) Setuju c) Netral
d) Tidak setuju e) Sangat tidak setuju
8. Teknologi, peralatan, perlengkapan, dan kemasan yang digunakan Bumdes bapak/ibu semakin baik.
- a) Sangat Setuju b) Setuju c) Netral
d) Tidak setuju e) Sangat tidak setuju

9. Pemasaran produk/jasa Bumdes bapak/ibus emakin luas
- a) Sangat Setuju b) Setuju c) Netral
d) Tidak setuju e) Sangat tidak setuju
10. Permintaan pasar terhadap produk/jasa Bumdes bapak/ibu meningkat.
- a) Sangat Setuju b) Setuju c) Netral
d) Tidak setuju e) Sangat tidaksetuju

Aspek Ekonomi: Keuntungan Usaha

11. Usaha Bumdes bapak/ibu mendatangkan keuntungan.
- a) Sangat Setuju b) Setuju c) Netral
d) Tidak setuju e) Sangat tidak setuju
12. Keuntungan usaha Bumdes bapak/ibu meningkat.
- a) Sangat Setuju b) Setuju c) Netral
d) Tidak setuju e) Sangat tidak setuju

Aspek Sosial: Keterkaitansosial dg Bumdes

1. Bapak/ibu mempunyai jabatan yang cukup penting di Bumdesdesa
- a) Sangat Setuju b) Setuju c) Netral
d) Tidak setuju e) Sangat tidak setuju
2. Karena jabatan di Bumdes tersebut, masyarakat sekitar lebih hormat/respek terhadap bapak/ibu.
- a) Sangat Setuju b) Setuju c) Netral

d] Tidak setuju e] Sangat tidak setuju

3. Sejak bapak/ibu aktif menjadi pengurus Bumdes desa, teman semakin banyak.

a] Sangat Setuju b] Setuju c] Netral
d] Tidak setuju e] Sangat tidak setuju

Aspek Sosial: Keikutan Asosiasi

4. Bumdes bapak/ibu ikut bergabung dengan asosiasi Bumdes

a] Sangat Setuju b] Setuju c] Netral
d] Tidak setuju e] Sangat tidak setuju

5. Bapak/ibu mempunyai jabatan/menjadi pengurus di asosiasi Bumdes tersebut.

a] Sangat Setuju b] Setuju c] Netral
d] Tidak setuju e] Sangat tidak setuju

6. Asosiasi Bumdes tersebut berada di tingkat Kabupaten

a] Sangat Setuju b] Setuju c] Netral
d] Tidak setuju e] Sangat tidak setuju

Aspek Sosial: Tanggapan Masyarakat thdp Bumdes

7. Masyarakat desa bapak/ibu mendukung berdirinya Bumdes di desa bapak/ibu

a] Sangat Setuju b] Setuju c] Netral
d] Tidak setuju e] Sangat tidak setuju

8. Masyarakat desa bapak/ibu tidak peduli berdirinya Bumdes di desa bapak/ibu
- a] Sangat Setuju b] Setuju c] Netral
d] Tidak setuju e] Sangat tidak setuju
9. Masyarakat desa bapak/ibu menolak berdirinya Bumdes di desa bapak/ibu
- a] Sangat Setuju b] Setuju c] Netral
d] Tidak setuju e] Sangat tidak setuju

Aspek Lingkungan; Ketersediaan bahan baku usaha

1. Bahan baku produk Bumdes bapak/ibu berasal dari desa setempat
- a] Sangat Setuju b] Setuju c] Netral
d] Tidak setuju e] Sangat tidak setuju
2. Bahan baku untuk produk Bumdes bapak/ibu berupa bahan baku alam
- a] Sangat Setuju b] Setuju c] Netral
d] Tidak setuju e] Sangat tidak setuju
3. Ada kemudahan memperoleh bahan baku untuk produk Bumdes bapak/ibu
- a] SangatSetuju b] Setuju c] Netral
d] Tidak setuju e] Sangat tidak setuju

Aspek Lingkungan: Perlakuan Sisa Bahan Baku Produksi

4. Bahan baku untuk produk Bumdes bapak/ibu menyisakan bekas bahan baku
- a) Sangat Setuju b) Setuju c) Netral
d) Tidak setuju e) Sangat tidak setuju
5. Sisa bahan baku tersebut didaur-ulang
- a) Sangat Setuju b) Setuju c) Netral
d) Tidak setuju e) Sangat tidak setuju
6. Sisa bahan baku tersebut dibuang begitu saja di daerah sekitar
- a) Sangat Setuju b) Setuju c) Netral
d) Tidak setuju e) Sangat tidak setuju

Aspek Politik: Keterlibatan Unsur Parpol

1. Unsur parpol terlibat dalam pendirian/pengelolaan Bumdes bapak/ibu
- a) Sangat Setuju b) Setuju c) Netral
d) Tidak setuju e) Sangat tidak setuju
2. Bentuk keterlibatan unsur parpol di Bumdes bapak/ibu adalah sebagai penasehat/pemberi sumbangan
- a) Sangat Setuju b) Setuju c) Netral
d) Tidak setuju e) Sangat tidak setuju
3. Unsur parpol cukup intens/dalam terlibat di Bumdes bapak/ibu
- a) SangatSetuju b) Setuju c) Netral

d] Tidak setuju

e] Sangat tidak setuju

Aspek Politik: .Afiliasi/ menjalin hubungan Dengan Parpol

4. Bumdes bapak/ibu menjalin hubungan khusus dengan parpol tertentu

a] Sangat Setuju

b] Setuju

c] Netral

d] Tidak setuju

e] Sangat tidak setuju

5. Ada pengurus Bumdes bapak/ibu berasal dari parpol tertentu

a] Sangat Setuju

b] Setuju

c] Netral

d] Tidak setuju

e] Sangat tidak setuju

6. Bumdes bapak/ibu ada mewakili kepentingan parpol tertentu

a] Sangat Setuju

b] Setuju

c] Netral

d] Tidak setuju

e] Sangat tidak setuju

7. Ada pengarahan agar pengurus dan anggota Bumdes bapak/ibu berafiliasi dengan parpol tertentu.

a] Sangat Setuju

b] Setuju

c] Netral

d] Tidak setuju

e] Sangat tidak setuju

Biodata Tim Peneliti

A. Identitas Diri

1	Nama Lengkap (dengan gelar)	Dr. Andy Alfatih, MPA
2	Jenis kelamin	Laki-Laki
3	Jabatan Fungsional	Lektor Kepala
4	NIP / NIK/ Identitas lainnya	196024121990011001
5	NIDN	0024126003
6	Tempat dan Tanggal Lahir	Tanah Abang [Kab. Musi Banyu Asin, Sumsel]
7	E-mail	alfatihmpa@yahoo.com
8	Nomor Telepon/HP	082175007376
9	Alamat Kantor	Fisip Unsri Kampus Indera Laya ,Kab. OganIlir
10	Nomor Telepon/Fax	(0711) 580608
11	Alamat Rumah	Kompleks Ogan Permata Indah, jalan Bangau 1 Blok A No. 22 RT. 063 Jaka Baring, Palembang 30257

B. Riwayat Pendidikan

2.1. Program:	S-1	S-2	S-3
2.2. Nama PT	Univ. Sriwijaya	Flinders University, Australia	Univ. Padjadjaran
2.3. Bidang Ilmu	Adm Negara	Public Policy and Public Sector Management	Adm Publik
2.4. Tahun Masuk	1983	1995	2005
2.5. Tahun Lulus	1988	1996	2009
2.6. JudulSkripsi/ Thesis/Disertasi	KoordinasiPengembangan Program Pariwisata di Palembang [Studi di Dinas Pariwisata]	Reinventing Government in Garuda Indonesia	Pengaruh Implementasi Program Kemitraan Terhadap Kinerja Usaha Kecil [Studithdp Usaha Kecil

			BinaanPT.Pusri [Persero] Palembang.
2.7. Nama Pembimbing /Promotor	Dr. Zulfikri Soleman, MA Drs. Mamat Ruhiyat.	Prof. Collin Sharp, PhD Prof. Bruce Geurin, PhD	Prof. H. Djadja Syaefullah, PhD Prof. Dr. Tuhpawana Senjaya Dr. Amin Ibrahim, M.A.

C. Pengalaman Penelitian dalam 5 Tahun Terakhir

No	Tahun	Judul Penelitian	Pendanaan	
			Sumber	Jumlah (juta Rp)
1	2021	Kebijakan Pemberdayaan dan Pemasaran Produk BUMDesBerbasis <i>E-Commerce</i> Di Kabupaten MusiRawas	Hikom	55 juta
2	2020	Dampak Implementasi Kebijakan Pendirian BUMDes (Studi Di Beberapa BUMDes Di Kecamatan Musi Rawas, Sumsel)	Hikom	48 juta
3	2019	Implementasi Kebijakan Pendirian BUMDes (Studi Di Beberapa BUMDes Di Kabupaten Musi Rawas, Sumsel)	Hikom	51,5 juta
4	2018	Pengaruh Implementasi Program Pembinaan Terhadap Kinerja Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Studi pada UMKM Binaan Dinas Koperasi dan UKM Sumsel,di Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2017)	Hikom	62,5 juta
5	2017	Kebijakan Tentang Penggunaan Ruang Publik (Kajian Terhadap Kebijakan dan Pemetaan Ruang Publik yang Ada di Kota Palembang)	Hikom	65 juta
6	2016	The Policy Of Public Space Use (Study On The Effectiveness Of The Use Of Public Spaces In Palembang City, Indonesia and Hanoi City, Vietnam, In Terms Of Sociological Pperspective)	Kolaborasi internasional	100 juta

**Tuliskan sumber pendanaan: PDM, SKW, Pemula, Fundamental, Hibah Bersaing, Hibah Pekerti, Hibah Pascasarjana, Hikom, Stranas, Kerjasama Luar Negeri dan Publikasi Internasional, RAPID, Unggulan Stranas, Insentif Sinas Kemenristek atau sumber lainnya.*

D. Pengalaman Pengabdian Kepada Masyarakat Dalam 5 Tahun Terakhir

No	Tahun	Judul Pengabdian Kepada Masyarakat	Pendanaan	
			Sumber*	Jumlah (Juta Rp)
1	2015	Penyuluhan Tentang Kompetensi Dasar Administrasi Kependudukan Di Desa Tanah Abang, Kecamatan Tanah Abang, Batang Hari Leko Kabupaten Musi Banyuasin	DIPA Unsri	Rp. 7.000.000
2	2016	Penyuluhan Tentang Kompetensi Dasar Administrasi Kependudukan Di Desa Bangke, Kecamatan Kota Agung, Kota Pagar Alam	DIPA Unsri	Rp. 9.700.000
3	2017	Penyuluhan Tentang Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa di Desa Tegur Wangi Baru, Kelurahan Pagar Alam, Kecamatan Dempo Utara, Kota Pagar Alam	DIPA Unsri	Rp. 9.500.000
4	2018	Penyuluhan Kompetensi Dasar Bagi Aparatur Pemerintahan Desa Dalam Memberikan Pelayanan Publik Di Desa Lorok Kecamatan Indralaya Utara Kabupaten Ogan Ilir	DIPA Unsri	Rp. 13.000.000
5	2019	Penyuluhan Administrasi Kependudukan Di Kelurahan Bandar Agung Kecamatan Banding Agung, Kabupaten Oku Selatan.	DIPA Unsri	Rp. 12.000.000
6	2020	Penyuluhan Tentang Kompetensi Dasar Administrasi Kependudukan Di Desa Lorok Kecamatan Indralaya Utara	DIPA Unsri	Rp. 13.000.000

		Kabupaten Ogan Ilir		
7	2021	Penyuluhan Tentang kebijakan penanganan lingkungan untuk menghindari penyakit menular di Kecamatan Pemulutan, Kabupaten Ogan Ilir [sebagai anggota Tim pengabdian dosen fakultas kedokteran. Kerja sama lintas fakultas] .	DIPA Unsri	Rp. 15.000.000

E. Publikasi Artikel Ilmiah pada Jurnal dalam 5 Tahun Terakhir

No	Tahun	Judul Artikel Ilmiah	ISSN/ Volume/ Nomor	Nama Jurnal	Link
1	2019	Empowerment program implementation on small and medium businesses positively influenced the performance of the businesses: (Study towards small and medium businesses empowered by the cooperative and small and medium office of Ogan Ilir Regency, Indonesia)	2249-8958 (ISSN)/ 8(5)	International Journal of Engineering and Advanced Technology	https://bit.ly/3vAun44
2	2018	Public policy of green open space development in Palembang City, Indonesia	2010-3646 (ISSN)/ 8(2)	<i>International Journal of Social Science and Humanity</i>	https://bit.ly/3r6m0dj
3	2017	The effectiveness of KambangIwakBesak park as a public space in Palembang City, Indonesia	1936-6612 (ISSN)/ 23(5)	<i>Advance Science Letters</i>	doi:10.1166/asl.2017.8952

F. Pengalaman Penulisan Buku dalam 5 Tahun Terakhir

No	Tahun	Judul	Jenis Buku (Referensi, Buku Ajar, Monograf, Book Chapter)	ISBN	Penerbit
1	2016	Dasar-dasar Metodologi Penelitian Sosial	Referensi dan digunakan untuk mengajar.	978-979-587-758-5	Unsri Press
2	2017	Pedoman Mudah Melaksanakan Penelitian Deskriptif Kualitatif	Referensi dan digunakan untuk mengajar.	978-979-587-806-3	Unsri Press
3	2016	Panduan Praktis Penelitian Deskriptif Kuantitatif	Referensi dan digunakan untuk mengajar.	978-979-587-782-0	Unsri Press
4	2020	Cara Mudah Kerjakan Penelitian Metode Kuantitatif Ekspalanatif (Confirmatory) 2 Variable: X dan Y	Referensi dan digunakan untuk mengajar.	978979 587 951 0	Unsri Press
5	2022	Kebijakan Pemberdayaan Badan Usaha Milik Desa [Bumdes]	Akan digunakan sbg Referensi.	Dalam proses penerbitan	

G. Hak Kakayaan Intelektual (HKI)

No	Tahun	Judul	Jenis (Patent, Paten Sederhana, Hak Cipta, Merk, Desain Industri, Indikasi Geografis, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu)	Status (Terdaftar/ Granted)
1	2016	Dasar-dasar Metodologi Penelitian Sosial	Buku	Terdaftar di Kemendiknas
2	2017	Pedoman Mudah Melaksanakan Penelitian Deskriptif Kualitatif	Buku	Terdaftar di Kemendiknas
3	2016	Panduan Praktis	Buku	Terdaftar di

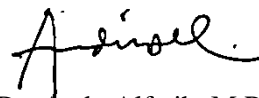
		Penelitian Deskriptif Kuantitatif		Kemendiknas
4	2021	Cara Mudah Kerjakan Penelitian Metode Kuantitatif Ekspalanatif (Confirmatory) 2 Variable: X dan Y	Buku	Terdaftar di Kemendiknas

H. Produk Inovasi

No	Tahun	Judul	Jenis (Prototipe Industri, Produk Inovasi, kebijakan)	Keterangan

Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila di kemudian hari ternyata dijumpai ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima risikonya. Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam pengajuan Hibah **Penelitian Kompetitif** Universitas Sriwijaya.

Palembang, 24 Januari 2022



Dr. Andy Alfatih, M.P.A
NIP. 196012241990011001

A. Identitas Diri

1. Nama Lengkap dengan Gelar	Dr. Diana Dewi Sartika, S.Sos., M.Si
2. Jenis Kelamin	Perempuan
3. Jabatan Fungsional	Lektor
4. NIP	198002112003122003
5. NIDN	0011028001
6. Tempat dan Tanggal Lahir	Prabumulih, 11 Februari 1980
7. E-mail	dianadewisartika@fisip.unsri.ac.id
8. Nomor HP	081322070004
9. Alamat Kantor	Kampus FISIP Unsri - Jl Raya Prabumulih Km 32 Inderalaya Ogan Ilir
10. Nomor Telpon / Fax	0711 – 580572

B. Riwayat Pendidikan

	S1	S2	S3
Nama Perguruan Tinggi	Universitas Sriwijaya	Univ.Gadjah Mada	Univ. Gadjah Mada
Bidang Ilmu	Sosiologi	Sosiologi	Sosiologi
Tahun Masuk – Lulus	1998-2003	2005-2007	2016 - 2021

C. Pengalaman Penelitian dalam 5 Tahun Terakhir

Tahun	Judul Penelitian
2021	Kebijakan Pemberdayaan dan Pemasaran Produk BUMDes Berbasis e-commerce di Kabupaten Musi Rawas
2020	Dampak Implementasi Kebijakan Pendirian BUMDes (Studi Di Beberapa BUMDes Di Kecamatan Musi Rawas, Sumsel) – (Skema Kompetitif Unsri)
2019	<i>Critical Discourse Analysis</i> : Isu Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia 2019-2024(Studi Pada Akun Instagram Kedua Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden) – (Skema Kompetitif Unsri)
2019	Implementasi Kebijakan Pendirian BUMDes (Studi Di Beberapa BUMDes Di Kecamatan Musi Rawas, Sumsel) – (Skema Kompetitif Unsri)

2018	Kualitas Keluarga Pemulung (Skema Kompetitif Unsri)
2018	Pengaruh Implementasi Program Pembinaan Terhadap Kinerja Usaha Mikro Kecildan Menengah (Studi pada UMKM Binaan Dinas Koperasi dan UKM Sumsel, di Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2017) – (Skema Kompetitif Unsri)
2017	Alternatif Pencegahan Lingkungan Fisik dan Sosial Pemulung (Skema Kompetitif Unsri)
2017	Model Pendampingan Keluarga Dalam Mendukung Proses Penyembuhan Penderita Strokedi Kota Palembang (Skema Kompetitif Unsri)
2017	Kebijakan Tentang Penggunaan Ruang Publik (Kajian Terhadap Kebijakan dan Pemetaan Ruang Publik yang Ada di Kota Palembang) – (Skema Kompetitif Unsri)
2016	The Policyof Public Space Use (Studyon The Effectiveness of The Useof Public Spacesin Palembang City, Indonesiaand Hanoi City, Vietnam (Kolaborasi dengan NAPA Vietnam)
2016	Kearifan Lokal Masyarakat Perairan dalam Memanfaatkan Sumber Daya Air Untuk Kebutuhan Sehari-hari (Studi di Daerah Perairan Pasang Surut Kecamatan Muara Padang, Kabupaten Banyuasin, Sumsel) – (Dikti – Tahun Kedua)

D. Pengalaman Pengabdian dan Keorganisasian dalam 5 Tahun Terakhir

Tahun	Judul Pengabdian Kepada Masyarakat
2021	Kepala Laboratorium Sosiologi, FISIP, Unsri
2020 – 2022	Koordinator Bidang Pemberdayaan dan Kesejahteraan, Forum Partisipasi Publik Untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak (PUSPA) Sriwijaya, Provinsi Sumatera Selatan
2020 – 2021	Anggota Tim Pelaksana, Organisasi Penelitian dan Pengembangan Kota Palembang
2018 – 2019	Anggota Tim Advokasi, Forum Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Sumatera Selatan (Puspa Srwijaya)
2018 – 2019	Anggota Komisi Sosial Budaya, Dewan Riset Daerah (DRD) Kota Palembang, dibawah koordinasi Bappeda Litbang Kota Palembang
2018 - sekarang	Fasilitator Nasional Program Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM)
2016 - sekarang	Fasilitator Daerah Provinsi Sumsel Program Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM)

E. Publikasi Artikel Ilmiah dalam Jurnal dalam 5 tahun Terakhir

Tahun	Judul	Nama Jurnal
2021	Dialectics of Transnational Mobility, Class, and Cultural Intermediary among Indonesian Migrant Worker-Students in South Korea	Jurnal Sinta 2, Jurnal Sosiologi Walisongo: https://journal.walisongo.ac.id/index.php/JSW/article/view/6842/pdf
2021	Policy Implementation on Establishment and Management of Village-Owned Enterprises in Indonesia	Jurnal Sinta 2, Society : https://society.fisip.ubb.ac.id/index.php/society/article/view/295/254
2021	Children In The Circle of Criminal Practices In Ogan Komering Ilir Regency, South Sumatera	Jurnal Sinta 2, Komunitas : https://journal.unnes.ac.id/nju/index.php/komunitas/article/view/21493/pdf
2021	Social Life of Scavengers in The Sukawinatan Landfill in Palembang, Indonesia	Jurnal Nasional, Journal of Social and Policy Issues https://journal.pencerah.org/index.php/jspi/article/view/55/33
2019	Empowerment Program Implementation on Small and Medium Businesses Positively Influenced the Performance of the Businesses: (Study towards Small and Medium Businesses Empowered by the Cooperative and	Scopus Index Journal : https://www.ijeat.org/wp-content/uploads/papers/v8i5C/E10420585C19.pdf

	Small and Medium Office of Ogan Ilir Regency, Indonesia)	
2019	Learning about Crime (A Study on Children in Conflict with The Law at LPKA of Palembang, South Sumatera, Indonesia)	Scopus Index Journal : https://www.ijeat.org/wp-content/uploads/papers/v8i5C/E10420585C19.pdf
2018	Public Policy on Green Open Space Development in Palembang City, Indonesia	Copernicus Index Journal : http://www.ijssh.org/
2017	The Effectiveness Of Kambang Iwak Besak Park As A Public Spaces, In Palembang City, Indonesia	Scopus Index Journal : http://www.ingentaconnect.com/

F. Pemakalah Seminar Ilmiah dan Narasumber dalam 5 tahun Terakhir

Nama Pertemuan Ilmiah	Materi yang disampaikan	Waktu dan Tempat
Pelatihan Aktivis PATBM (Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat)	Konsep dan Strategi PATBM	Kabupaten OKI -
		Kabupaten OI -
		Kabupaten Pali -
		Kabupaten OKUT -
		Kabupaten Lahat -
		Kota Lubuk Linggau -
Pelatihan Aktivis PATBM (Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat)	Konsep dan Strategi PATBM	Desa Limau, Kabupaten Banyuasin – Desember 2019
Pelatihan Konvesi Hak Anak	Peran Serta Masyarakat dalam Perlindungan Anak	Kabupaten Muratara – Desember 2019
Pelatihan Bagi Fasilitator	Konsep dan Strategi PATBM	Palembang –

PATBM se Sumsel		Desember 2019
Pertemuan Rutin Dharma Wanita Dinas Perkim Provinsi Sumsel	Parenting dan Perlindungan Anak	Palembang – Juli 2019
Bimbingan Teknis Aktivistis PATBM	Konsep dan Strategi PATBM	Palembang – Maret 2019
Pelatihan Bagi Fasilitator PATBM se Sumsel	Konsep dan Strategi PATBM	Palembang – Desember 2018
Pelatihan Aktivistis PATBM (Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat)	Konsep dan Strategi PATBM	Kabupaten OKU – Juli 2018
		Kabupaten OKUS – Juli 2018
		Kabupaten OKUT – Juli 2018
		Kabupaten OI – Agustus 2018
		Kabupaten OKI – Agustus 2018
		Kabupaten Banyuasin – September 2018
		Kabupaten Muba – September 2018
		Kota Palembang – Oktober 2018

Semua data saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila di kemudian hari ternyata dijumpai ketidaksesuaian dengan kenyataan saya sanggup menerima sanksi. Demikian biodata ini saya buat dengan sebenar-benarnya untuk memenuhi persyaratan dalam pengajuan penelitian.

Inderalaya, 26 Januari 2022



Dr. Diana Dewi Sartika, S.Sos, M.Si
NIP. 198002112003122003

A. Identitas Diri

1	Nama Lengkap (dengan gelar)	Dra. Dyah Hapsari Eko Nugraheni.M.Si
2	Jenis kelamin	Perempuan
3	Jabatan Fungsional	Lektor Kepala
4	NIP	196010021992032001
5	NIDN	0001016025
6	Tempat dan Tanggal Lahir	Blora 2 Oktober 1960
7	E-mail	dyahhapsari@fisip.unsri.ac.id
8	Nomor Telepon/HP	081367663351
9	Alamat Kantor	Kampus FISIP UNSRI JLN Palembang – Prabumulih KM32 Inderalaya Kab: Ogan Ilir SUMSEL
10	Nomor Telepon/Fax	0711- 580572
11	Alamat Rumah	Jln Siaran no 28 B Kenten Prumnas Sako Palembang

B. Riwayat Pendidikan

2.1. Program:	S-1	S-2
2.2. Nama PT	Universitas Gadjah Mada	Universitas Sriwijaya
2.3. Bidang Ilmu	Sosiologi	Administrasi Publik
2.4. Tahun Masuk	1979	2006
2.5. Tahun Lulus	Januari 1986	2008
2.6. JudulSkripsi/ Thesis/Disertasi	Siaran Pedesaan Dan Penerimaan Teknologi Pertanian Modern Di Kalangan Pedesaan	Implementasi Peraturan Walikota Palembang Nomor 5a Tahun 2005 tentang Penempatan Pedagang di Pasar Retail Jakabaring
2.7. Nama Pembimbing /Promotor	Drs. Purwanto Drs.Soenjoto	Prof.Dr.H.Waspodo ,MA Dr.Kgs.M.Sobri.M.Si

C. Pengalaman Penelitian dalam 5 Tahun Terakhir

No.	Tahun	Judul Penelitian	Pendanaan	
			Sumber	Jumlah (juta Rp)
1.	2020	Dampak Implementasi Kebijakan Pendirian BUMDes (Studi Di Beberapa BUMDes Di Kecamatan Musi Rawas, Sumsel)	PNBP UNSRI	52.000.000
2.	2020	Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Sikap Laki-laki Terhadap Pemukulan Istri Di Rumah Tangga	PNBP UNSRI (Fakultas)	25.000.000
3.	2019	Determinan Kekerasan Domestik terhadap Perempuan di Indonesia.	PNBP UNSRI	52.000.000
4.	2019	Implementasi Kebijakan Pengelolaan Kebun Sriwijaya	PNBP UNSRI	
5.	2018	Analisis Hadist Lingkungan Hidup dengan Pendekatan Jejaring Sosial	PNBP UNSRI	52.000.000
6	2018	Strategi Pemasaran Sosial Bank Sampah Prabumulih Dalam Mengajak Masyarakat untuk Menabung Sampah	PNBP UNSRI	
7.	2017	Pemanfaatan Modal Sosial dan Kearifan Lokal dalam Mewujudkan gerakan Nasional Revolusi Mental Indonesia bersatu di Kabupaten Ogan Ilir Provinsi Sumatera Selatan.	PNBP UNSRI (Saintek)	
7.	2017	Public policy of green open space development in Palembang City,Indonesia	PNBP UNSRI	
8	2017	Pemberdayaan Santri Pondok Pesantren Al-Furqon Kota Prabumulih melalui Pengembangan Kewirausahaan	PNBP UNSRI	
9.	2016	The effectiveness of Kambang Iwak Besak park as a public space in Palembang City, Indonesia.	Kolaborasi Internasional dg Vietnam	
10	2016	Peran Pendidikan Kewarganegaraan Dalam Pembentukan Karakter Bangsa Dan Cinta Tanah Air Pada Mahasiswa Universitas Sriwijaya	PNBP UNSRI	26.250.000

D. Pengalaman Pengabdian Kepada Masyarakat Dalam 5 Tahun Terakhir

No	Tahun	Judul Pengabdian Kepada Masyarakat	Pendanaan	
			Sumber*	Jml (Juta Rp)
1.	2020	Penguatan Kompetensi Literasi Digital Santri Madrasah Aliyah Pondok Pesantren Al-Ittifaqiah Inderalaya	PNBP UNSRI	12.500.000
2.	2020	Pemberdayaan Petani Kopi Dalam Mendorong Program “ <i>ONE VILLAGE ONE PRODUCT</i> ” Di Desa Palak Tanah Kecamatan Semende Darat Tengah Kabupaten Muara Enim (SKEMA KKN TEMATIK)	PNBP UNSRI	20.000.000
3.	2019	Sosialisasi Implementasi Nilai-Nilai Pancasila Bagi Siswa Siswi SMA Negeri 2 Indralaya Utara	PNBP UNSRI	12.500.000
4.	2019	Membangun Karakter Bangsa Melalui Pendidikan Kewarganegaraan Pada Siswa SMA Lingua Prima Inderalaya	PNBP UNSRI	12.500.000
5.	2019	IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN KEBUN SRIWIJAYA	PNBP UNSRI	23.000.000
6	2018	PENDAMPINGAN GERAKAN ANTI NARKOBA DI SMK LINGUA PRIMA INDRALAYA KABUPATEN OGAN ILIR	PNBP UNSRI	12.500.000
7.	2017	Pendampingan Kesehatan Reproduksi Remaja Di SMA Negeri I Unggulan Inderalaya Utara Kabupaten Ogan Ilir	PNBP UNSRI	
8	2016	Pengembangan Usaha Kerajinan Menuju Peningkatan Akses Pasar Bagi Kelompok Usaha Bisnis Pemula di Kota Daro II Kecamatan Rantau Panjang Kab. Ogan	PNBP UNSRI	
9	2016	Asistensi Dan Pendampingan Proses Perizinan industry Rumah Tangga Krupuk Kemplang Di Desa Meranjat II Kabupaten OI	PNBP UNSRI	

E. Publikasi Artikel Ilmiah pada Jurnal dalam 5 Tahun Terakhir

No	Tahun	Judul Artikel Ilmiah	ISSN/ Volume/ Nomor	Nama Jurnal	Link
1.	2019	Neighborhood Disadvantage and Violence against Woman in South Sumatra Province, Indonesia	1995-1272 (ISSN)/ 13(3)	FWU Journal of Social Science (SCOPUS)	https://bit.ly/2QDOECH
2.	2019	Empowerment program implementation on small and medium businesses positively influenced the performance of the businesses: (Study towards small and medium businesses empowered by the cooperative and small and medium office of Ogan Ilir Regency, Indonesia)	2249-8958 (ISSN)/ 8(5)	International Journal of Engineering and Advanced Technology	https://bit.ly/3vAun44
3.	2018	Public policy of green open space development in Palembang City, Indonesia	2010-3646 (ISSN)/ 8(2)	<i>International Journal of Social Science and Humanity</i>	https://bit.ly/3r6m0dj
4.	2017	The effectiveness of Kambang Iwak Besar park as a public space in Palembang City, Indonesia	1936-6612 (ISSN)/ 23(5)	<i>Advance Science Letters</i>	doi:10.1166/asl.2017.8952
5.	2015	Strategi Pemberdayaan Usaha Rumahan Berbasis Potensi Lokal untuk Meningkatkan Produktivitas Keluarga	2614-0144 (E-ISSN), 2621-525X (ISSN)/ 3(1)	<i>Jurnal Pengabdian Sriwijaya</i>	doi:10.37061/jps.v3i1.2133

F. Pengalaman Penulisan Buku dalam 5 Tahun Terakhir

No	Tahun	Judul	Jenis Buku (Referensi, Buku Ajar, Monograf, <i>Book Chapter</i>)	ISBN	Penerbit
1.	2019	Implementasi Kebijakan	Buku Ajar		UNSRI

G. Hak Kakayaan Intelektual (HKI)

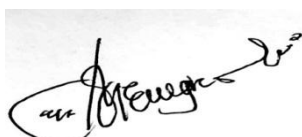
No	Tahun	Judul	Jenis (Paten, Paten Sederhana, Hak Cipta, Merk, Desain Industri, Indikasi Geografis, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu)	Status (Terdaftar/ <i>Granted</i>)

H. Produk Inovasi

No	Tahun	Judul	Jenis (Prototipe Industri, Produk Inovasi, kebijakan)	Keterangan

Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila di kemudian hari ternyata dijumpai ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima risikonya. Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam pengajuan Hibah Kompetitif Universitas Sriwijaya.

Palembang, 26 Januari 2022



Dra. Dyah Hapsari Ekonugraheni, M. Si
NIP. 196010021992032001